

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

**BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT PONTIANAK**

2024



Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun:

Graziano Raymond P, S.Pi., M.Si.

Akmal Fathu Rohman, S.Si.

Vita Fitriana Mayasari, S.Si.

Ratih Tribuwana Dhewi, S.Kel.

Kontributor:

Sub-bagian Umum BPSPL Pontianak

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepada-Nya dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Triwulan I Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi *stakeholder* kami

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan Kerjasama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontiana, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 25 April 2024
Kepala BPSPL Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas **13 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **12 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **24 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I yaitu 115 (kategori Biru = Istimewa).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada Triwulan I yaitu:

1. IKM 19 Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) target 1 dan capaian 1
2. IKM 16 Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) target 94% dan capaian 116,67%
3. IKM 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikn (%) target 100% dan capaian 100%.

Pagu awal anggaran BPSPL Pontianak sebesar **Rp 18.598.113.000**. Realisasi anggaran pada Triwulan I berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 31 Maret 2024 yaitu **Rp 3.620.583.906** atau **19,47%** dari pagu bruto. Berdasarkan kondisi terkini pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kinerja BPSPL Pontianak berjalan dengan baik. Namun, terdapat kendala terkait dengan kegiatan pendukung untuk Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru. Hal itu dikarenakan alokasi anggaran masih dalam blokir. Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan II dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengusahakan untuk proses revisi anggaran dalam rangka membuka anggaran yang diblokir.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN sampai dengan pencantuman gelar Pendidikan, bagi ASN yang telah melakukan Tugas/Ijin Belajar.
3. Mempertahankan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah dengan melakukan pendampingan secara mandiri pada kelompok penerima bantuan.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2023 yaitu telah dilakukan koordinasi secara aktif dan berkelanjutan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	I
Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	IV
Daftar Gambar.....	VI
Daftar Tabel.....	VII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.1.1. Kedudukan.....	1
1.1.2. Tugas	1
1.1.3. Fungsi	1
1.2. Susunan Organisasi	3
1.3. Keragaman SDM.....	4
1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.....	4
1.4.1. Potensi.....	4
1.4.2. Permasalahan	5
1.5. Dasar Hukum	6
1.6. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024	8
2.1.1. Visi	9
2.1.2. Misi	9
2.1.3. Tujuan	10
2.1.4. Sasaran Strategis.....	10
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024	11
2.3. Metode Pengukuran Kinerja	16
2.3.1. Rumusan Pengukuran	16
2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBK BPSPL Pontianak.....	21
3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	24

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	29
3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	33
3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	39
3.1.6.Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	41
3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak	47
3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak.....	52
3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak.....	57
3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	62
3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak.	65
3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	70
3. 2. Realisasi Anggaran.....	95
BAB IV PENUTUP	97
4.1. Kesimpulan	97
4.2. Rekomendasi	97
4.3. Tindak Lanjut.....	97
LAMPIRAN.....	98

Daftar Gambar

Gambar 1.1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3
Gambar 1.1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak	4
Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerja)	18
Gambar 3.1.1-2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I	19
Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I	20
Gambar 3.1.2-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan	26
Gambar 3.1.2-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah	26
Gambar 3.1.2-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah	27
Gambar 3.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan	27
Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL	31
Gambar 3.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	31
Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA	33
Gambar 3.1.4-2. Pengamatan Populasi Pesut	36
Gambar 3.1.4-3. Koordinasi Survei Monitoring Sosial Ekonomi	37
Gambar 3.1.7-1. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan	48
Gambar 3.1.7-2. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat	49
Gambar 3.1.8-1. Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat	54
Gambar 3.1.8-2. Pembuatan <i>Coral Stock Center</i> di Kalimantan Timur	55
Gambar 3.1.8-3. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar	55
Gambar 3.1.9-1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi	59
Gambar 3.1.9-2. Pemeriksaan SAJI	59
Gambar 3.1.10-1. Sosialisasi Perizinan Berusaha Jasa Kelautan	64
Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan	67
Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah	67
Gambar 3.1.11-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah	68
Gambar 3.1.11-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan	68
Gambar 3.1.12-1. Kegiatan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	82

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023.....	12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024	14
Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak	22
Tabel 3.1.1-2 Progres Capaian PNPB BPSPL Pontianak Triwulan I.....	23
Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak	24
Tabel 3.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan I	28
Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak	29
Tabel 3.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan I.....	30
Tabel 3.1.3-3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan I	32
Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria	33
Tabel 3.1.4-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA	34
Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	34
Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak	34
Tabel 3.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut.....	36
Tabel 3.1.4-6. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan I	37
Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak	39
Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan I	40
Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak	41
Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan I	42
Tabel 3.1.6-3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak	44
Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak	47
Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 8 Triwulan I.....	50
Tabel 3.1.7-3. Realisasi IKU 9 Triwulan I.....	51
Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak	52
Tabel 3.1.8-2. Hasil Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat.....	54
Tabel 3.1.8-3. Rekapitulasi Kejadian Biota Terdampar.....	55
Tabel 3.1.8-4. Realisasi IKU 10 Triwulan I.....	56
Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak	57
Tabel 3.1.9-2. PNPB Triwulan I	60
Tabel 3.1.9-3. Realisasi IKU 11 Triwulan I.....	61
Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 PNPB BPSPL Pontianak.....	62
Tabel 3.1.10-2. Capaian IKU 12 Triwulan I.....	64
Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak	65
Tabel 3.1.11-2. Realisasi Anggaran IKU 13 Triwulan I	69
Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak	70
Tabel 3.1.12-2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan I	72
Tabel 3.1.12-3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak.....	73
Tabel 3.1.12-4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak.....	75
Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan I	76
Tabel 3.1.12-6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak	77
Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKM 17	78
Tabel 3.1.12-8. Kategori Nilai PM SAKIP	79
Tabel 3.1.12-9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak	80
Tabel 3.1.12-10. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan I	82
Tabel 3.1.12-11. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak.....	83

Tabel 3.1.12-12. Efisiensi dari capaian IKM 19 Triwulan I.....	83
Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan I.....	84
Tabel 3.1.12-14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak.....	85
Tabel 3.1.12-15. Efisiensi dari capaian IKM 20 Triwulan I.....	86
Tabel 3.1.12-16. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak.....	87
Tabel 3.1.12-17. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak.....	88
Tabel 3.1.12-18. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah	90
Tabel 3.1.12-19. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak.....	91
Tabel 3.1.12-20. Realisasi Anggaran IKM 23 Triwulan I	92
Tabel 3.1.12-21. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan.....	92
Tabel 3.1.12-22. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak.....	93
Tabel 3.1.12-23. Realisasi Anggaran IKM 24 Triwulan I	94
Tabel 3.2-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan I	95
Tabel 3.2-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023	96

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu sejak terbitnya Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan yaitu melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

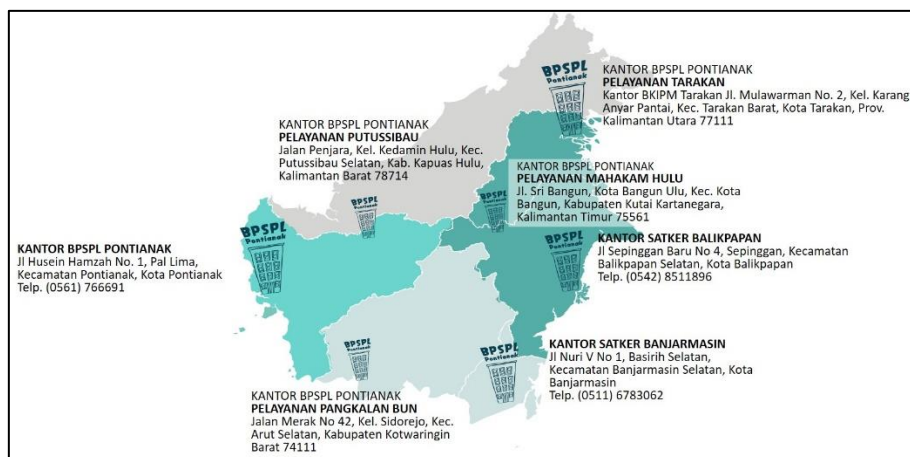
- g. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional;
- d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), *Ramsar Convention on Wetlands of International Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
- e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- f. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
- g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Permen KP No. 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menjelaskan Lokasi, Satuan Kerja, dan Wilayah Kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat atau BPSPL Pontianak memiliki satuan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wilayah kerja dari BPSPL Pontianak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih jelas dapat melihat peta di bawah ini.

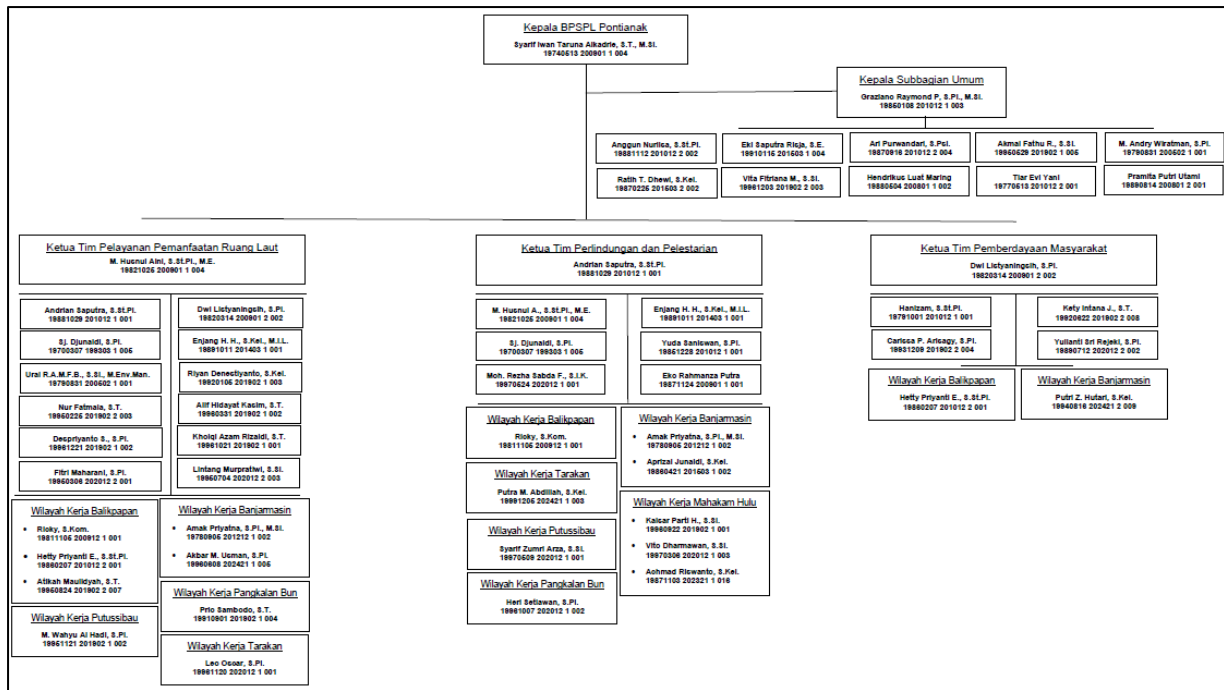


Gambar 1.1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK).

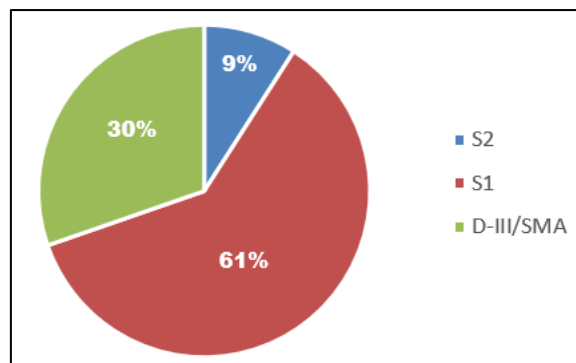
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tersebut, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari: (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat, (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajerial yang diketuai oleh Kepala Subbagian Umum.



Gambar 1.1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.3. Keragaman SDM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada Triwulan IV Tahun 2023 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 70 orang terdiri dari 48 ASN (44 PNS dan 4 PPPK) dan 21 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun perincian PPNPN yang berjumlah 21 orang merupakan Satpam, Pramubakti dan Petugas Kebersihan, Pramudata/Petugas Pelayanan, dan Pengemudi. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Untuk komposisi PNS dan PPNPN berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik di bawah sebagai berikut:



Gambar 1.1.3-3. Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.4.1. Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 542.430,35 km² terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun jumlah total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari jumlah total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30

Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

1.4.2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.
- d. Masih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.
- e. Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
- g. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
- h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2023 disusun dengan dasar hukum:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mentaeri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
- h. Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional (jika ada);
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- vii. Kegiatan Pendukung.
- viii. Realisasi Anggaran
- ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020- 2025 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMENKP/2020 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”. Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah “**Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL**”.

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Pada tahun 2024 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota

3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Pontianak merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
 - b. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

2. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - d. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah berbasis pada *Balanced Scorecard (BSC)*. PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKM). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
[SK-7] Meningkatnya Nilai PNBSP BPSPL Pontianak	(SK-1) Meningkatnya Nilai PNBSP BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kegiatan	(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-1] Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut,	[SK-3] Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut,

Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Tahun 2023	Tahun 2024
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-4] Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	[SK-4] Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-2] Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	[SK-5] Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kegiatan	[SK-6] Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-3] Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	[SK-7] Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-5] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	[SK-8] Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-6] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	[SK-9] Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kegiatan	[SK-10] Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kegiatan	[SK-11] Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-7] Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, November 2023 dan Maret 2024

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

IKK	IKK
Tahun 2023	Tahun 2024
[IK-7] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	[IK-1] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-2] Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

IKK	IKK
Tahun 2023	Tahun 2024
[IK-1] Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	[IK-3] Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IK-4] Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	[IK-4] Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
[IK-2] Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	[IK-5] Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-6] Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-7] Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
[IK-3] Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	[IK-8] Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-9] Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)
[IK-5] Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IK-10] Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IK-6] Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IK-11] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-12] Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-13] Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

IKK	IKK
Tahun 2023	Tahun 2024
[IK-8] Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IK-14] Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-9] Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IK-15] Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-10] Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Pontianak (Nilai)	[IK-16] Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-11] Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada BPSPL Pontianak (Inovasi)	Tidak Terdapat Indikator Kegiatan
[IK-12] Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	[IK-17] Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
[IK-13] Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IK-18] Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-14] Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	[IK-19] Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IK-15] Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	[IK-20] Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)
[IK-16] Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	[IK-21] Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
[IK-17] Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)	[IK-22] Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)
[IK-18] Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak (%)	[IK-23] Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-24] Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Sumber data: BPSPL Pontianak, November 2023 dan Maret 2024

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBK BPSPL Pontianak	1.	Nilai PNBK BPSPL Pontianak (Rp.000)	2.000.000

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2.	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	320
3.	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	3
4.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	14
5.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1
6.	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6.	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
		7.	Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
7.	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2
		9.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)	1
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10.	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
9.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12.	Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
11.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	4
12.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93,76
		15.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	86
		16.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
		17.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	88
		18.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	81
		19.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4
		20.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		21.	Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		22.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	80
		24. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	65

Sumber data: BPSPL Pontianak - DJPKRL, Maret 2024

2.3. Metode Pengukuran Kinerja

2.3.1. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Score Card (BSC).

2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulanan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja

- Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
- Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah keatas (level IV sampai ke level 0); dan
- Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kontribusi/adopsi langsung dari pencapaian kinerja bawahannya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja

Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisis IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
- Menghitung Realisasi IKU
- Mengalikan dengan bobot validasi IKU
- Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/>)

5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable dan obyektif.
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja dibawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PRL merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

Contents

BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024	8
2.1.1. Visi.....	9
2.1.2. Misi.....	9
2.1.3. Tujuan	10
2.1.4. Sasaran Strategis.....	10
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024	11
2.3. Metode Pengukuran Kinerja.....	17
2.3.1. Rumusan Pengukuran.....	17
2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja	17

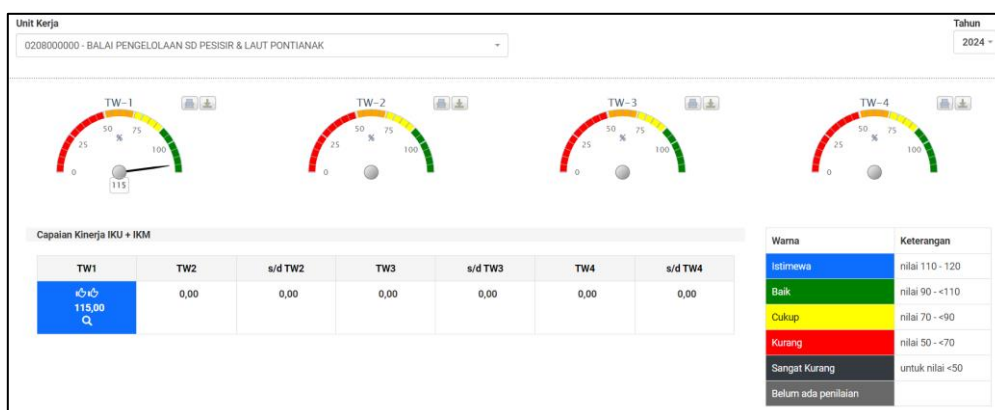
Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023.....	12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024.....	14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKM). Perhitungan IKU dan IKM diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara *online* yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.




Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **IKU+IKM** BPSPL Pontianak pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu **115%** (masuk kategori Biru = **Istimewa**). NKO IKU pada Tahun 2023 (Triwulan I) sebesar 111,45%. Terdapat peningkatan 3,55% dari Triwulan I Tahun 2023. Peningkatan nilai disebabkan bertambahnya target dalam perhitungan tahunan. Dari 24 Indikator Kinerja Kegiatan, hanya 4 Indikator yang memiliki periode penilaian Triwulanan. Terdapat 3 Indikator Kinerja yang tercapai dan satu indikator yang belum tercapai, yaitu IKU 8 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Hal itu dikarenakan pada Triwulan I masih dilakukan identifikasi dan verifikasi Kelompok Masyarakat terlebih dahulu. Secara singkat capaian kegiatan pada Triwulan I dapat dilihat pada infografis di bawah ini.


CAPAIAN KINERJA BPSPL PONTIANAK TRIWULAN I TAHUN 2024




PNBP BPSPL Pontianak
Target: Rp 2.000.000.000
Realisasi: Tahunan
Progres capaian nilai PNBP Triwulan I sebesar Rp 590.569.912



Tenaga Kerja Bulan Cinta Laut
Target: 320 orang
Realisasi: Tahunan
Progres kegiatan yaitu Identifikasi lokasi Gernas BCL, verifikasi nelayan dan mitra




Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut
Target: 3 Dokumen
Realisasi: Tahunan
Progres kegiatan yaitu koordinasi pelaksanaan kegiatan, verifikasi PKKPR dan monitoring pemanfaatan ruang laut



Persentase Peningkatan EVIKA
Target: 14%
Realisasi: Tahunan
Progres kegiatan yaitu monitoring biota dilindungi, monitoring sosial ekonomi, pengadaan sarpras



Fasilitasi KKPD
Target: 1 Daerah
Realisasi: Tahunan
Belum ada progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I




Kerjasama Konservasi
Target: 1 Kerjasama
Realisasi: Tahunan
Progres kegiatan yaitu penyusunan kerjasama KK Mahakam Hulu dengan DKP Kutai Kartanegara



Kemitraan Konservasi
Target: 1 Kemitraan
Realisasi: Tahunan
Progres kegiatan yaitu draf perjanjian kemitraan dengan FPIK Universitas Mulawarman




Bantuan KOMPAK
Target: 2 Kelompok
Realisasi: Triwulanan
Progres kegiatan yaitu identifikasi kelompok masyarakat penggerak konservasi




Pengembangan Mata Pencaharian Baru
Target: 1 Kelompok
Realisasi: Tahunan
Belum terdapat progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I karena terdapat blokir anggaran



Jenis Ikan Terancam Punah
Target: 7 Jenis
Realisasi: Tahunan
Progres kegiatan yaitu pendataan populasi Kima, pembuatan coral stock center, penanganan biota terdampar



Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan
Target: 4 Jenis
Realisasi: Tahunan
Progres kegiatan yaitu pelayanan operasional perizinan

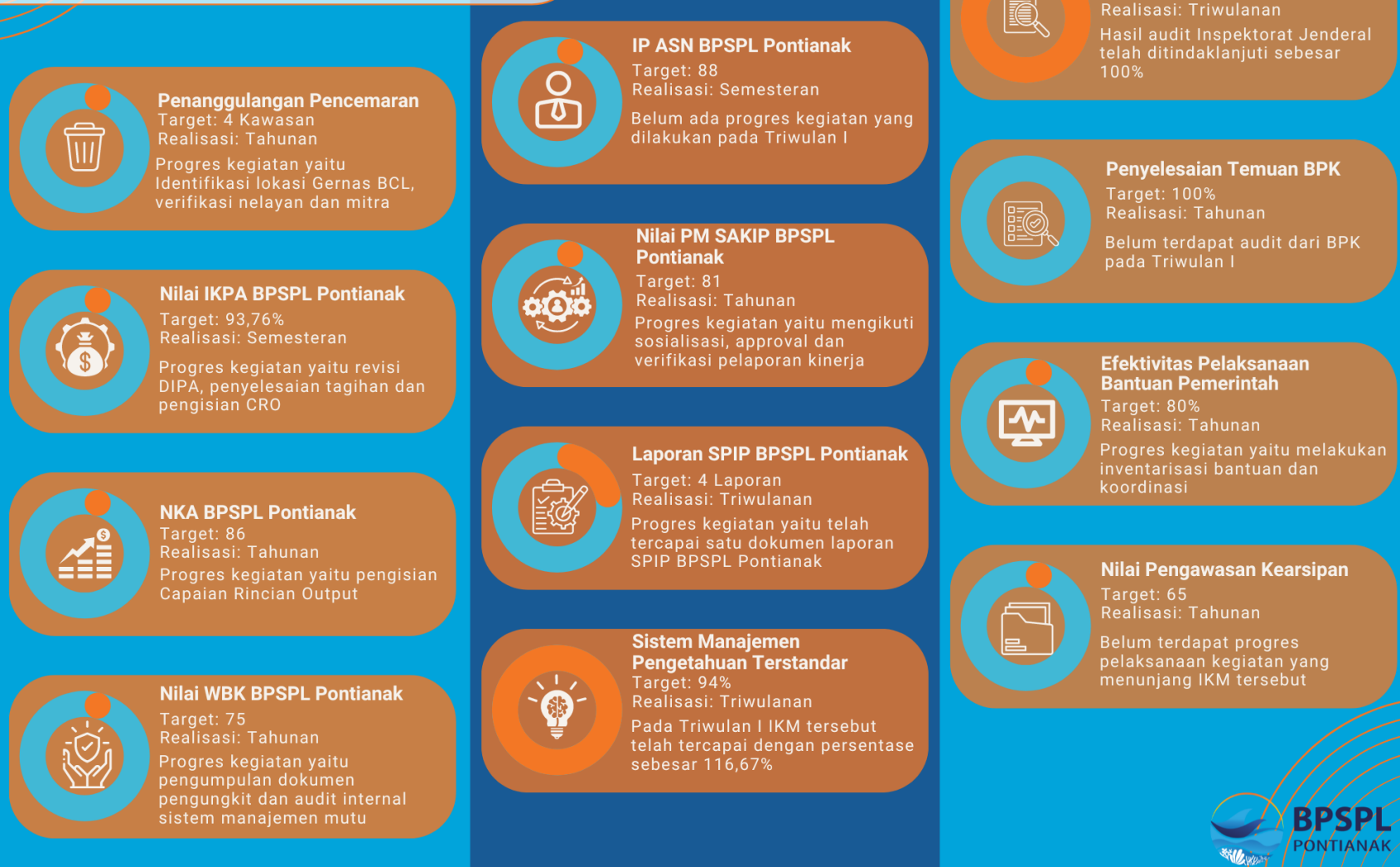


Pemanfaatan ALSE
Target: 1 Dokumen
Realisasi: Tahunan
Progres kegiatan yaitu sosialisasi Perizinan Jasa Kelautan



Gambar 3.1.1-2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I

CAPAIAN KINERJA BPSPL PONTIANAK TRIWULAN I TAHUN 2024



Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) + Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) + Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) yang diperoleh dari Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

$$PNBP_{BPSPL\ Pontianak} = PNBP_{Layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{Lainnya}$$

dimana,

$$PNBP_{Layanan} = SAJI\ DN + Surat\ Rekomendasi\ DN + Surat\ Rekomendasi\ LN + Denda$$

Keterangan:

SAJI DN = Pungutan atas Dokumen SAJI DN ¹⁾ + Pungutan Perdagangan + Pungutan Pengambilan ²⁾

Surat Rekomendasi = Pungutan atas Dokumen Rekomendasi + Pungutan Perdagangan

$PNBP_{Layanan}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan

$PNBP_{BMN}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

$PNBP_{Lainnya}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut.

Keterangan:

¹⁾ untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%

²⁾ dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi Penghitungan Pungutan

Pungutan Pengambilan = Jumlah Individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan

Pungutan Perdagangan = Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan

Denda = Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Permohonan

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK-1	Meningkatnya Nilai PNBSP BPSPL Pontianak								
IKU-1	Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp000)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
2.374.620.820	Periode Capaian Tahunan			2.000.000	0	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian nilai PNBSP Triwulan I (per tanggal buku 1 Januari – 31 Maret 2024) yaitu senilai Rp 590.569.912 atau 29,52% dari target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun untuk progres nilai PNBSP Triwulan I tahun 2024 (Rp 590.569.912,-) mengalami peningkatan sebesar 103% jika dibandingkan dengan progres nilai PNBSP Trwiluan I tahun 2023 (Rp 571.418.506,-).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian kinerja riwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PRKL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar Rp 2.000.000.000,-. Capaian kinerja riwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024. Namun, progress niali PNBSP Triwulan I tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 29,52% dari target tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan I sebesar 30% dari target tahunan. Hal itu didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBSP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBSP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBSP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMPONI untuk menerbitkan dan memvalidasi PNBPN yang diterima.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) selama bulan Januari – Maret 2024. Selain itu, ada pula pungutan PNBPN dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBPN hingga Triwulan I 2024.

Tabel 3.1.1-2 Progres Capaian PNBPN BPSPL Pontianak Triwulan I

Jenis PNBPN	Januari	Februari	Maret
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp166.667	Rp166.667	Rp166.667
Pendapatan Perizinan Lainnya	Rp97.605.000	Rp95.040.000	Rp82.080.000
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	Rp84.835.416	Rp122.154.895	Rp108.354.600
Total	Rp182.607.083	Rp217.361.562	Rp190.601.267
Total TW I	Rp590.569.912		

8. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan I Tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan April – Juni 2024, pemungutan PNBPN untuk layanan dan izin yang diterbitkan oleh BPSPL Pontianak, serta pemungutan PNBPN dari Sewa Gedung dan Bangunan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Teknik Menghitung

$$TK_{\text{BPSPL Pontianak}} = TK_{\text{Lokasi 1}} + TK_{\text{Lokasi 2}} + TK_{\text{Lokasi 3}} + TK_{\text{Lokasi 4}}$$

Keterangan:

$TK_{\text{BPSPL Pontianak}}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak

$TK_{\text{Lokasi 1,2,3,4}}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SK-2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU-2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	Periode Capaian Tahunan			320	0	-	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya: identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gernas BCL, identifikasi dan verifikasi nelayan dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pihak terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu sebanyak 5 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mengikuti kegiatan secara daring.

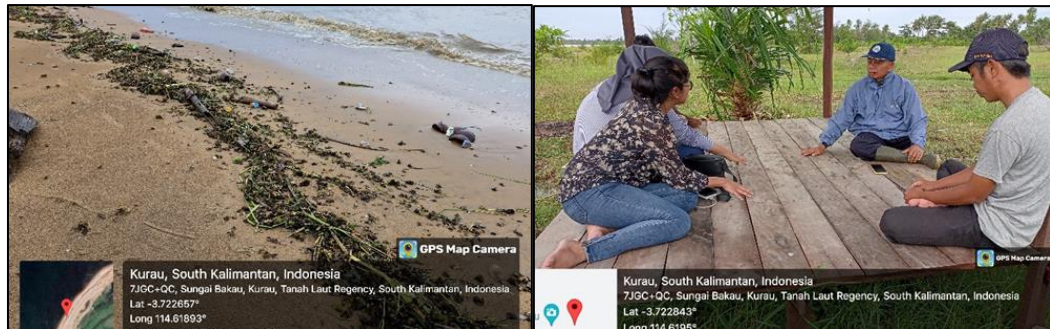
7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gernas BCL

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di tiga lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Desa Tanipah Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 – 20 Januari 2024 . Di Desa Tanipah, sudah ada mesin pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2018. Namun mesin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang dicuri. Terdapat kelompok nelayan aktif yang sebagian besar anggotanya sudah memiliki KUSUKA di kedua lokasi tersebut. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut didominasi oleh sampah kayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di sekitar Desa Tanipah, namun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang berjarak 22 km. Terdapat bank sampah di Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi keaktifannya.



Gambar 3.1.2-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan di Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam dan Desa Keraya, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 16 – 18 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Teluk Bogam yang sudah memiliki mobil pengangkut sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampah di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Keraya belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.



Gambar 3.1.2-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah

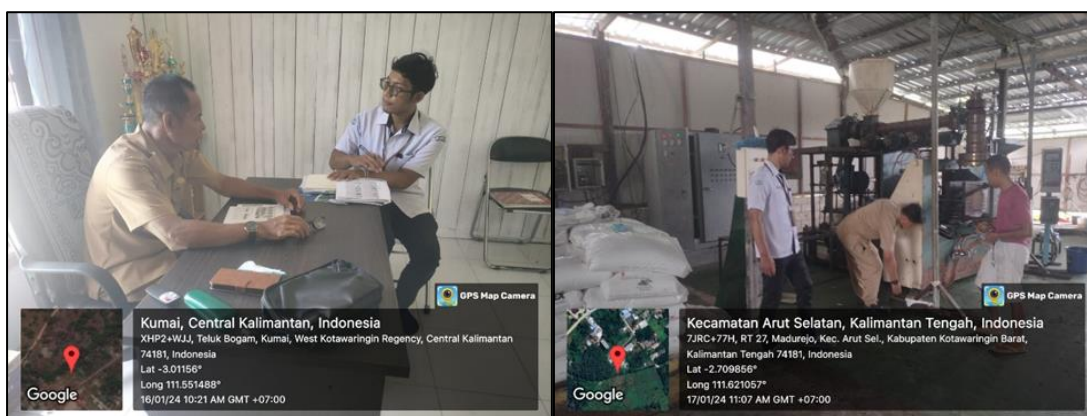
Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Setapak Besar, Desa Kuala dan Desa Naram Kota Singkawang pada tanggal 16 – 19 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan mitra pengelola sejauh 3 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 15 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggian Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah laut dan pembersihan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang mereka kumpulkan hanya ditimbun atau dibuang ke TPS terdekat dan belum ada kerjasama dengan mitra bank sampah untuk penjualan sampah yang terkumpul atau model economy sirkular lainnya dari sampah dikumpulkan.

b. Identifikasi dan Verifikasi Nelayan dan Mitra

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan nelayan setempat. Terdapat 80 nelayan dan KUB yang sudah diidentifikasi. Identifikasi terhadap mitra yang berkomitmen untuk mendukung kegiatan BCL berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Beberapa bank sampah/ pengumpul sampah juga berhasil diidentifikasi sebagai mitra *offtaker* potensial. Indikator penilaian lainnya, seperti harga ikan terendah dan musim melaut serta musim paceklik juga sudah dilakukan. Harapannya data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensi lokasi ini bisa mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan Gernas BCL.



Gambar 3.1.2-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok nelayan setempat. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan data kelompok nelayan di Daerah Aluh-Aluh Kab. Banjar dan Sungai Bakau Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut, belum terverifikasi keaktifannya.



Gambar 3.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya diperoleh informasi tentang Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data bahwa di Kota Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kota Singkawang dengan hasil berupa data kelompok nelayan di Setapak Besar dan Kuala sebanyak 9 (sembilan) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan meliputi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan DP3 Kota Balikpapan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gernas BCL Tahun 2024 dan mengusulkan agar kegiatan Gernas ini dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kampanye dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih melalui Gernas BCL.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD.001] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 75.460.534 atau 4,37% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Tabel 3.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 34.970.034 (4,37%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp75.460.534 (4,37%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Kegiatan sosialisasi dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Gernas BCL dengan melibatkan nelayan lokal, instansi daerah dan *stakeholder* lain yang terkait.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

SK-3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-3	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Periode Capaian Tahunan			3	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya: koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang laut, verifikasi lapangan permohonan KKPR di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, mengikuti bimbingan teknis KKPR di Kota Denpasar dan kegiatan monitoring pemanfaatan ruang laut di Kalimantan Timur.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu persentase penyelesaian perizinan sebesar 100% di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar 3 Dokumen. Capaian kinerja Triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut. Hal ini disebabkan saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan penilaian teknis secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Pendampingan dalam verifikasi teknis PKKPRL telah dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut kepada 16 pemohon pemanfaatan ruang laut di wilayah Kalimantan. Verifikasi teknis KKPRL terbanyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 10 pemohon, sementara verifikasi teknis paling sedikit dilakukan di Kalimantan Utara sebanyak satu pemohon.

Tabel 3.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan I

Provinsi	Jumlah Pemohon	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Barat	2	Januari, Maret
Kalimantan Selatan	3	Januari, Februari
Kalimantan Timur	10	Januari - Maret
Kalimantan Utara	1	Februari
Total		

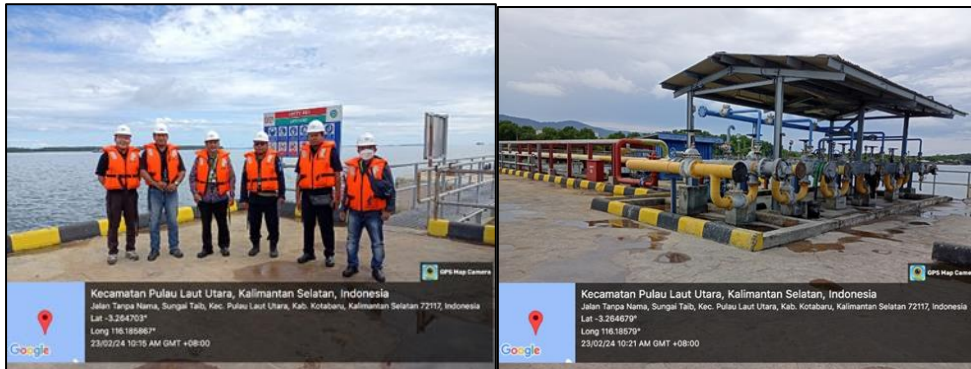
Kegiatan ini juga didukung lebih lanjut dengan Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL. Verifikasi Lapangan yang telah dilaksanakan diantaranya untuk Permohonan KKPRL Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21 – 24 Februari 2024. Selain itu, ada pula verifikasi lapangan untuk Permohonan KKPRL PT Energi Unggul Persada yang berlokasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada tanggal 3 – 8 Maret 2024.



Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL

b. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Telah dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk pemanfaatan ruang laut BUT Eni Muara Bakau dan BUT Eni East Ganal Limited di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Pendampingan Pengawasan KKPRL PT Citra Manajemen di Kabupaten Kayong Utara tanggal 12 – 14 Februari 2024, Pendampingan Pengawasan KKPRL PT PT. Bima Budidaya Mutiara dan CV. Borneo Mutiara di Kabupaten Bengkayang tanggal 22 – 23 Februari 2024. Selain itu, juga dilakukan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut milik PT Sime Darby Oils di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 23 – 24 Februari 2024.



Gambar 3.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya: rapat penyelenggaraan KKPRL UPT Lingkup Ditjen PKRL di Kota Bandung, Pelatihan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Bandung, Pelatihan Pemanfaatan Ruang Laut Bidang Perikanan di Kota Malang, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut di DKI Jakarta.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2366.PBT.009] Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 126.122.845 atau 10,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.150.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Sewa.

Tabel 3.1.3-3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2366.PBT.009.051] Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 174.774.000	Rp 34.302.290 (19,63%)	-
2.	[2366.PBT.009.052] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 375.226.000	Rp 78.468.845 (20,91%)	
3.	[2366.PBT.009.053] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 600.000.000	Rp 34.302.290 (19,63%)	
TOTAL		Rp 1.150.000.000	Rp 126.122.845 (10,97%)	-

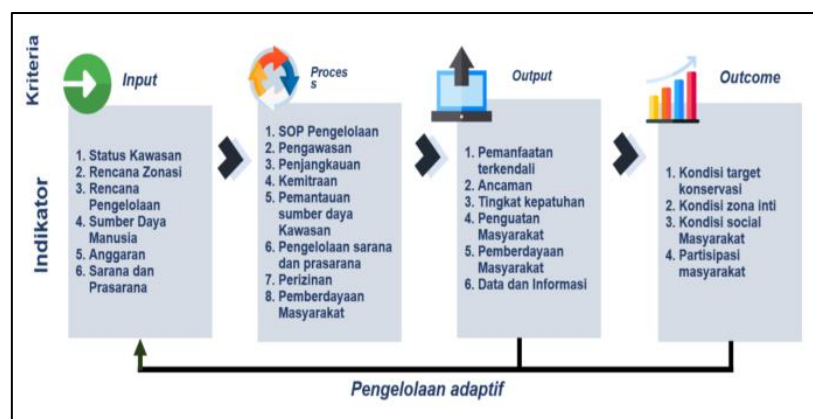
9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, melakukan verifikasi teknis permohonan KKPRL lanjutan untuk bulan April – Juni, serta melakukan monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolannya seluas 42.667,99 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan. Nilai tersebut dapat tercapai setelah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEPDJPKRL/2020. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.



Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10-25	9
Proses	8	10-25	12
Output	6	15-20	13
Outcome	4	20-30	8
Total	24		42

Tabel 3.1.4-2. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria	Ni	Nmax	NK (%)	BK	Nak (%)
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
Output	...	650	...	0,25	...
Outcome	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:

- Nilai Indikator (Ni) : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator
- Nilai Maksimum (nMax) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
- Nilai Kriteria (NK) : $Ni / nMax \times 100\%$
- Bobot Kriteria (Bk) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
- Nilai Akhir Kriteria (Nak) : $Nk \times Bk$
- Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

SK-4	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-4	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
36,44	Periode Capaian Tahunan			14	-	-	-	17,8 jt Ha	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya: pertemuan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Hayati Laut, survey jenis biota dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu, monitoring sosial ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dan pengadaan sarana/prasarana pendukung konservasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 36,44%, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 14%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 17,8 juta Ha di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. Selain itu, satuan yang digunakan dalam pengukuran kinerja berbeda dengan target Renstra Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu seluas 42.000 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 30% di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Target tersebut sudah tercapai di tahun 2023 yaitu dengan nilai EVIKA sebesar 36,44%. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu, perlu peningkatan alat penunjang survei terutama dalam monitoring Pesut Mahakam. Kendala tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Survei Jenis Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi pesut mahakam pada tanggal 2 – 10 Maret 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei pemantauan keberadaan pesut dilakukan menggunakan kapal Orcaella milik Yayasan Konservasi RASI dimulai pada pukul 08.00 - 18.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kapal dan tiga pengamat lainnya mengamati dari sisi kapal. Selain itu, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan.



Gambar 3.1.4-2. Pengamatan Populasi Pesut

Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari di atas kapal, didapatkan tujuh kemunculan pesut dengan jumlah individu sebanyak 42 ekor. Individu terbanyak yang diamati berlokasi di Hulu Rimba Ayu sebanyak 14 ekor. Sementara individu paling sedikit diamati di Sungai Kedang Rantau sebanyak dua ekor. Waktu kemunculan pesut sebagian besar terlihat pada sekitar pukul 10 Waktu Indonesia Tengah. Waktu paling pagi ditemukannya pesut yaitu pukul 08.17. Sementara waktu paling sore ditemukannya pesut yaitu pukul 16.37.

Tabel 3.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut

No.	Lokasi Kemunculan	Jumlah Pesut	Waktu	Aktivitas
1.	Sangkuliman	9	12.12	Sighting
2.	Sungai Kedang Rantau	2	16.37	Sighting
3.	Muara Wis	6	17.58	Sighting
4.	Hulu Rimba Ayu	14	10.49	Sighting
5.	Muara Danau Semayang	5	08.17	Sighting
6.	Muara Pela	3	10.01	Sighting
7.	Liang Ulu	3	10.39	Sighting

Pada hasil stasiun pengamatan kualitas air menunjukkan bahwa kondisi perairan berada pada baku mutu sungai dan sejenisnya kelas 2 yaitu peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang didapatkan di stasiun pengukuran menunjukkan nilai suhu berkisar antara 20,4 – 31 C. Sementara untuk nilai Oksigen Terlarut berkisar antara 2,7 – 5,2. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 5,8 – 7,25. Sementara nilai TDS berkisar antara 13 – 45 ppm.

b. Koordinasi Survei Monitoring Sosial Ekonomi

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Februari 2024 bertempat di Laboratorium Pengembangan Masyarakat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi awal tim BPSPL Pontianak dilakukan bersama akademisi dosen sosial ekonomi Universitas Mulawarman dengan memaparkan rencana survei Monitoring Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Setelah pertemuan, akademisi dari Universitas Mulawarman kemudian memberikan kuisisioner yang telah ditelaah, yakni: Kuisisioner Masyarakat Sekitar Kawasan (MSK), Kuisisioner Rumah Tangga Perikanan (RTP), Kuisisioner Pariwisata dan Kuisisioner Persepsi Individu. Kemudian kuisisioner yang telah

dilisting ini akan dipergunakan di 5 desa per 5 kecamatan. Kemudian data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis, untuk kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk menjadi pertimbangan survei sosial ekonomi di desa berikutnya.



Gambar 3.1.4-3. Koordinasi Survei Monitoring Sosial Ekonomi

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2024. Sarana dan prasarana yang disediakan diantaranya: air conditioner split, longboat operasional, televisi, echosounder, drone DJI, alat komunikasi, longboat mini dan tab operasional.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REA.002] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 355.688.284 atau 14,33% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.481.306.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.

Tabel 3.1.4-6. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.REA.002.051] Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 593.000.000	Rp 283.671.322 (47,84%)	-
2.	[2362.REA.002.052] Data dan Informasi Kawasan Konservasi	Rp 715.368.000	Rp 28.687.134 (4,01%)	-
3.	[2362.REA.002.053] Pemberdayaan Masyarakat	Rp 809.044.000	Rp 42.925.428 (5,31%)	-
4.	[2362.REA.002.054] Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi	Rp 363.894.000	Rp 404.400 (0,11%)	-
TOTAL		Rp 2.481.306.000	Rp 355.688.284 (14,33%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan di Triwulan II diantaranya: monitoring sosial ekonomi, pendataan jenis ikan ekonomis, survei pemanfaatan kawasan, sosialisasi rencana pengelolaan dan survei biota dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain sesuai kondisi Kawasan Konservasi. Teknik perhitungan Indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SK-5	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU-5	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
3	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Belum terdapat progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 2 daerah, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 1 daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebesar 29,3 juta Ha di Tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 1 dokumen di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini bergantung oleh keaktifan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Belum terdapat progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.UBA.001] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 3.983.526 atau 3,98% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.UBA.001.051] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp 3.983.526 (3,98%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp 3.983.526 (3,98%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan draf kesepakatan kerja sama yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK-6	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU-6	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	2	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU “Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)”. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada triwulan I, capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan.

Progres kegiatan yang dilakukan adalah Inisiasi Jejaring Kemitraan dan Penyusunan Kerja Sama Kawasan Konservasi Mahakam Hulu pada 24 Januari 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu, kegiatan Pertemuan Inisiasi Perjanjian Kerja Sama Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dilakukan pada 25 Maret 2024 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya draf 0 Perjanjian Kerja Sama telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.963/BPSPL.2/TU.210/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Penyampaian Draft 0 Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU “Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)”. Sehingga Triwulan I tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 19 juta hektar pada 2023 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring, kemitraan/kerja sama dan konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya draf Perjanjian Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, draf tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat DJPKRL untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I, sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungan capaian NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Pembahasan Implementasi Perjanjian Kerjasama Konservasi dan Rencana Kegiatan 2024 pada 30 Januari 2024 di Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama dilakukan pemantauan capaian implementasi kerja sama setiap triwulan. Pada triwulan I, BPSPL Pontianak telah menyampaikan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.971/BPSPL.2/TU.140/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Penyampaian Laporan Capaian Implementasi Perjanjian Kerja Sama Triwulan I Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [PEC.001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut.

Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PEC.001.051.A] Penyusunan Kesepakatan Bersama	Rp70.000.000	Rp22.845.635 (32,64%)	-
TOTAL		Rp70.000.000	Rp22.845.635 (32,64%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 6 Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp22.845.635 atau 32,64% dari pagu anggaran Rp70.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Perlengkapan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan/Narasumber); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transpor Peserta).

Output yang telah dicapai pada Triwulan I dengan realisasi anggaran tersebut adalah Draf Perjanjian Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun draf tersebut masih dalam proses pembahasan lanjutan pada Sekretariat DJPKRL dan parapihak.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

- a. Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretariat DJPKRL, Direktorat lingkup DJPKRL, BPSPL Pontianak, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pihak terkait lainnya.
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

IKU 7. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik perhitungan Indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kesepakatan kemitraan yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6-3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SK-6	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU-7	Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	Capaian thd Target Renstra	
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	2	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU “Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)”. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada triwulan I, capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan.

Progres kegiatan yang dilakukan adalah Inisiasi Jejaring Kemitraan dan Penyusunan Kerja Sama Kawasan Konservasi Mahakam Hulu pada 24 Januari 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu, pembahasan inisiasi dan pembahasan final draf perjanjian kemitraan dilanjutkan pada tanggal 12 Februari 2024 secara daring.

Selanjutnya, Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.743/BPSPL.2/HK.320/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal Permohonan Persetujuan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman (FPIK UNMUL). Surat tersebut telah diberikan tanggapan melalui Surat Plh. Sekretaris DJPRL Nomor B.1742/DJPKRL.1/TU.210/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Persetujuan Perjanjian Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU “Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)”. Sehingga Triwulan I tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 19 juta hektar pada 2023 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan

dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring, kemitraan/kerja sama dan konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draft Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draft Perjanjian Kemitraan tersebut telah diajukan permohonan paraf kepada Sekretaris DJPRL dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I, sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan capaian NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dalam Pelaksanaan IKU ini adalah penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.933/BPSPL.2/TU.210/III/2024 tanggal 25 Maret hal Permohonan Paraf Persetujuan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman kepada Sekretaris DJPRL; dan B.934/BPSPL.2/TU.210/III/2024 tanggal 25 Maret hal Permohonan Paraf Persetujuan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Selain itu, kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Pembahasan Implementasi Perjanjian Kerjasama Konservasi dan Rencana Kegiatan 2024 pada 30 Januari 2024 di Cirebon, Jawa Barat.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [PEE.001] Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut.

Tabel XX. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 7 pada Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PEE.001.051.A] Inisiasi Jejaring dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp75.460.534 (75,46%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp75.460.534 (75,46%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 7 Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp75.460.534 atau 75,46% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Seminar Kit, dan Bahan Publikasi); Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transpor Peserta dan Paket Fullday di Kalimantan Timur).

Output yang telah dicapai pada Triwulan I dengan realisasi anggaran tersebut adalah Draf Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draf tersebut masih dalam proses permohonan paraf Sekretaris DJPRL dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi di Triwulan II Tahun 2024 adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat.

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK-7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Periode Capaian Dimulai Triwulan II			2	-	3	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dimulai pada Triwulan II. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu identifikasi kelompok masyarakat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun, target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL Tahun 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dimulai pada Triwulan II.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima bantuan

konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dimulai pada Triwulan II.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU ini bergantung kepada keaktifan kelompok masyarakat dalam memenuhi berkas kelengkapan administrasi persyaratan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memastikan kelengkapan administrasi persyaratan telah sesuai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan

Kegiatan identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan dilakukan pada tanggal 16 s.d. 20 Januari 2024 yang berlokasi di Desa Teluk Tamiang dan Desa Tanjung Sungkai, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Terdapat dua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang diidentifikasi, yaitu POKMASWAS Padaidi dan POKMASWAS Selayar Bersatu.



Gambar 3.1.7-1. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Padaidi merupakan kelompok masyarakat yang berlokasi di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kelompok ini diantaranya pengawasan biota laut dilindungi, penanganan biota laut terdampar dan rehabilitasi terumbu karang. Pada tahun 2019, kelompok ini sudah/belum pernah mendapatkan bantuan KOMPAK dari Direktorat KKHL berupa peralatan selam, peralatan snorkeling dan pelampung.

b. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat

Kegiatan identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat dilakukan pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2024 di Kabupaten Kendawangan. Identifikasi dilakukan kepada empat kelompok masyarakat: POKMASWAS Cempedak Lestari,

POKMASWAS Tengar Bersatu, POKMASWAS Sadar Wilayah Pelapis, POKMASWAS Mangrove Cilincing Bersatu.

Kelompok Masyarakat Pengawas Cempedak Lestari berlokasi di Dusun Pulau Cempedak, Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif memonitoring kemunculan biota dilindungi seperti dugong, lumba-lumba, pesut dan penyu. Kelompok ini juga melakukan rehabilitasi habitat satwa dilindungi dengan cara penanaman mangrove dan lamun baik secara swadaya maupun bekerjasama dengan instansi/LSM/peguruan tinggi. Adapun untuk bantuan KOMPAK, Kelompok ini mengusulkan kapal fiber dengan kapasitas 6-8 orang dengan yang menggunakan mesin tempel 40 PK untuk mendukung kegiatan Kelompok.



Gambar 3.1.7-2. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat

Kelompok Masyarakat Pengawas Tengar Bersatu berlokasi di Pulau Sawi, Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif melakukan patroli kegiatan illegal fishing dan kebersihan perairan. Selain itu mereka juga memonitoring kemunculan biota dilindungi seperti dugong, lumba-lumba dan penyu. Kelompok ini juga melakukan rehabilitasi habitat satwa dilindungi dengan cara penanaman mangrove dan lamun baik secara swadaya maupun bekerjasama dengan instansi/LSM/peguruan tinggi. Adapun untuk bantuan KOMPAK, Kelompok ini mengusulkan peralatan pemantauan berupa teropong, rompi, kaos, topi, jas hujan untuk mendukung kegiatan Kelompok.

Kelompok Masyarakat Pengawas Sadar Wilayah Pelapis berlokasi di Pelapis, Kec. Kepulauan Karimata, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif melakukan patroli kegiatan illegal fishing dan kemudian dilaporkan ke PSDKP Teluk Batang. Selain itu mereka juga memonitoring kemunculan biota dilindungi seperti dugong dan lumba-lumba. Kelompok Sadar Wilayah Pelapis juga melakukan rehabilitasi habitat satwa dilindungi dengan cara transplantasi terumbu karang secara swadaya maupun bekerjasama dengan instansi/LSM/peguruan tinggi. Kelompok ini pernah menerima bantuan rompi dari Kecamatan. Adapun untuk bantuan KOMPAK, Kelompok ini mengusulkan peralatan perlengkapan pelestarian atau rehabilitasi terumbu karang untuk mendukung kegiatan Kelompok.

Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove Celincing Bersatu berlokasi di Desa Suka Baru, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Pada saat ini kelompok Celincing Bersatu aktif melakukan pelestarian mangrove baik secara swadaya maupun bekerjasama dengan instansi/LSM/peguruan tinggi/swasta. Kelompok ini sebelumnya pernah menerima bantuan dari Dinas Pariwisata berupa gazebo, WC dan

gertap serta bantuan trekking mangrove dari Pemerintah Kabupaten Ketapang. Adapun untuk bantuan KOMPAK, Kelompok ini mengusulkan sarana/prasarana ekowisata ramah lingkungan yang sesuai dengan ketentuan pemanfaatan jenis kawasan konservasi.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 24.883.609 atau 9,85% dari pagu anggaran sebesar Rp 252.545.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 8 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.QEH.001.051] Pemberian bantuan KOMPAK	Rp 252.545.000	Rp 24,883,609 (9,85%)	-
TOTAL		Rp 252.545.000	Rp 24,883,609 (9,85%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Mempersiapkan pengadaan barang untuk bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Melakukan serah terima pemberian bantuan KOMPAK.

IKU 9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik menghitung dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Capaian IKU 9 BPSPL Pontianak Sebagai berikut

SK-7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak									
IKU-9	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	2	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Belum ada progress kegiatan yang dilakukan karena masih terdapat blokir anggaran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU “Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru”. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum ada progress kegiatan yang dilakukan karena masih terdapat blokir anggaran. Perlu adanya pembukaan blokir anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini belum dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REA.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan. Belum terdapat realisasi anggaran karena masih terdapat blokir anggaran. Perlu adanya pembukaan blokir anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan.

Tabel 3.1.7-3. Realisasi IKU 9 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.REA.003.052] Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp 350.000.000	Rp 0 (0,00%)	Rp 350.000.000
TOTAL		Rp 350.000.000	Rp 0 (0,00%)	Rp 350.000.000

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Perlu adanya pembukaan blokir anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan.

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 10. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Penyu, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

- Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Penyu, Kima, Lola, Terubuk, dan Pari Air Tawar.
- Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang.
- Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak

SK-8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak									
IKU-10	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
13	Periode Capaian Tahunan			7	-	9	-	20	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2024 yaitu untuk 3 jenis berikut: Kima (penyediaan data populasi), Karang (pembuatan *Coral Stock Center* dan survey pemantauan *coral bleaching*), dan Mamalia Laut (respon cepat penanganan mamalia laut terdampar).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak memiliki target triwulanan. Namun, pada Triwulan I tahun 2023 terdapat capaian sebesar 3 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2024 (3 jenis), maka progres kegiatan sama dengan capaian Triwulan I tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan I sebanyak 3 jenis memiliki peran sebesar 15% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 9 jenis di tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra Ditjen PKRL karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan I sebanyak 3 jenis memiliki peran sebesar 30% dari capaian target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan data populasi kima, pembuatan *Coral Stock Center* dan respon cepat mamalia laut terdampar. Respon cepat mamalia laut terdampar memerlukan informasi yang akurat dari masyarakat yang melapor, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan pelapor.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Survei Penyediaan Data Populasi Kima

Kegiatan penyediaan data populasi kima di Kalimantan Barat dilaksanakan di perairan sekitar Pulau Lemukutan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 3 – 6 Februari 2024. Sebelum survei, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang berlokasi di Aula Kantor Desa Pulau Lemukutan. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang merupakan warga Desa Pulau Lemukutan yang berprofesi sebagai nelayan, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.



Gambar 3.1.8-1. Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

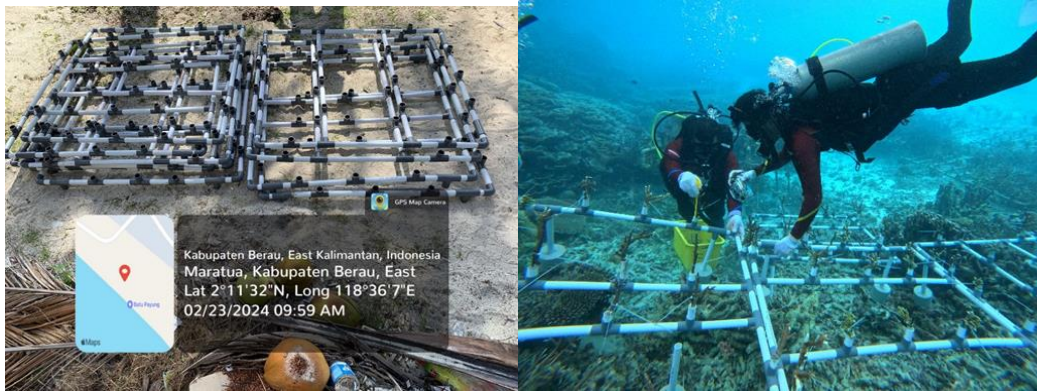
Metode survey pendataan populasi kima yang dilakukan adalah metode *belt transek* yaitu dengan menarik garis transek lurus sejajar garis pantai dengan panjang 100 meter dan lebar area pengamatan 5 meter (2,5 meter kanan dan 2,5 meter kiri pengamat) pada 7 stasiun pendataan. Total jumlah Kima (*Tridacna spp.*) yang ditemukan di 7 lokasi pendataan di Pulau Lemukutan yaitu 984 ekor dengan jenis *Tricadna crocea*, *Tricadna maxima* dan *Tricadna squamosa*. Jumlah kima terbanyak ditemukan di Taman Kima sebanyak 278 ekor. Sementara jumlah kima paling sedikit ditemukan di Teluk Surau dengan sebanyak 89 ekor.

Tabel 3.1.8-2. Hasil Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

No	Stasiun	Spesies	Jumlah
1	Tel. Surau	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	89
2	Tel. Cina	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	167
3	Tj. Palembang	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	152
4	Taman Kima	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	278
5	Air Tiris	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	119
6	Tj. Batu Bedaun	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	85
7	Tj. Merohom	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	94
Total			984

b. Pembuatan *Coral Stock Center*

Pembuatan *Coral Stock Center* dilaksanakan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 - 27 Februari 2024. Kegiatan pembuatan *Coral Stock Center* dan Survey Pemantauan Coral Bleaching di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dilaksanakan oleh tim dari BPSPL Pontianak dan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Maratua Peduli Lingkungan (MPL), Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Maratua, TNI AL Pulau Maratua, PT. Surga Hijau Lestari (Green Nirvana Resort), dan PT. Pratasaba Apta (Pratasaba Resort).



Gambar 3.1.8-2. Pembuatan *Coral Stock Center* di Kalimantan Timur

Transplantasi karang dilakukan menggunakan media pipa paralon berukuran 1 x 1 meter, dengan jumlah bibit pada masing-masing media berjumlah 16 fragmen bibit karang. Bibit karang diambil dari sekitar lokasi *Coral Stock Center* pada kedalaman sekitar 5-10 meter. Adapun titik peletakan rak transplantasi berada pada kedalaman 5-10 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi substrat berupa pasir. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan dari 10 (sepuluh) rak pipa paralon, jenis karang yang ditanam adalah *Acropora* spp., *Porites* sp., *Millepora* sp. dan *Hydnophora* sp. dengan jumlah fragmen mencapai 160 fragmen karang.

c. Respon Cepat Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah

Selama periode Januari hingga Maret 2024 tercatat 4 (empat) informasi kejadian terkait biota dilindungi dan/atau terancam punah yang meliputi kejadian terdampar, terjerat jaring, dan biota yang hanyut. Terdapat 4 (empat) jenis biota dilindungi dan/atau terancam punah yang dilakukan penanganan yaitu dugong, lumba-lumba, penyu, dan pesut. Sebanyak 1 (satu) kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (kode 1) dan 3 (tiga) kejadian merupakan biota dengan kondisi mati (kode 3 dan kode 4). Penanganan biota dalam kondisi hidup dilakukan pelepasliaran sedangkan penanganan biota mati dengan cara dikuburkan pada sekitar lokasi penemuan.



Gambar 3.1.8-3. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar

Tabel 3.1.8-3. Rekapitulasi Kejadian Biota Terdampar

No	Waktu Kejadian	Lokasi	Jenis Biota	Jumlah	Kode Kejadian	Respon
1	30 Januari 2024	Pantai Pulau Matasirih, Kec. Pulau Sembilan	Lumba - Lumba	6 Ekor	KODE 4	Dikuburkan

2	21 Februari 2024	Perairan Sungai Desa Bukit Jering, Kec. Muara Kaman	Pesut	1 Ekor	KODE 3	Dikuburkan
3	23 Februari 2024	Perairan Pantai Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota	Penyu	1 Ekor	KODE 3	Dikuburkan
4	14 Maret 2024	Pulau Cempedak, Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan	Dugong	1 Ekor	KODE 1	Dilepasliarkan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB.001] Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 183.903.980 atau 23,32% dari pagu anggaran sebesar Rp 750.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.

Tabel 3.1.8-4. Realisasi IKU 10 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp 344.720.000	Rp 69.784.980 (20,24%)	-
2.	[2362.REB.001.052] Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah	Rp 226.034.000	Rp 109.006488 (48,23%)	-
3.	[2362.REB.001.053] Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	Rp 82.246.000	Rp 5.112.512 (6,22%)	-
4.	[2362.REB.001.054] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	Rp 97.000.000	Rp 0 (0,00%)	-
TOTAL		Rp 750.000.000	Rp 183.903.980 (24,52%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melaksanakan kegiatan sosialisasi biota dilindungi/terancam punah, survei pendataan populasi terubuk di Kalimantan Barat, survei pendataan populasi penyu di Kalimantan Barat dan mengikuti kegiatan Festival Pesisir Paloh di Kalimantan Barat.

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).
- Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Apendiks, Teripang, dan Arwana).
- Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species; penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

SK-9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
5	Periode Capaian Tahunan			4	-	5	-	20	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan. Namun, progress capaian Triwulan I Tahun 2024 yaitu pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan untuk 5 jenis ikan (Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Arwana Super Red, Arwana Silver dan Teripang) serta verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan untuk 4 jenis ikan (Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Arwana Super Red dan Arwana Silver).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 sebanyak 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah berperan sebesar 25% dari Target Jangka Menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 5 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra BPSPL Pontianak karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah berperan sebesar 100% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi)

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap bulan (Januari – Maret). Kegiatan ini terdiri dari:

➤ Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada Triwulan I terdapat 5 pelaku usaha yang melakukan permohonan verifikasi SIPJI di Provinsi Kalimantan Barat.

➤ *Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi*

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan I terdapat total 80 Surat Rekomendasi dengan 74 surat diterbitkan ke dalam negeri (DN) dan 6 surat ke luar negeri (LN). Untuk jenis hiu dan pari *look alike species*, sebanyak 58 surat telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 22 Surat Rekomendasi untuk jenis teripang telah diterbitkan. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk hiu dan pari *look alike* terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 20 surat. Sementara penerbitan Surat Rekomendasi untuk teripang terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 13 surat.



Gambar 3.1.9-1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi

➤ *Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)*

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman di dalam negeri. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan I terdapat 30 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 393 SAJI DN untuk jenis Arwana telah diterbitkan. Penerbitan SAJI DN untuk hiu dan pari Appendiks CITES terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 11 surat. Sementara penerbitan surat rekomendasi untuk arwana terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 386 surat.



Gambar 3.1.9-2. Pemeriksaan SAJI

- *Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)*
Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEBP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan I terdapat 197 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana telah dilakukan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 194 surat.
- *Verifikasi Stok Ikan*
Verifikasi Stok Ikan dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Stok Ikan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai.
- *Verifikasi Hasil Panen*
Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai.
- *Pengesahan Sertifikat Hasil Pemanenan*
Pengesahan Sertifikat dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Pengesahan Sertifikat berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai. Selama Triwulan I terdapat ... Pengesahan Sertifikat untuk untuk jenis Arwana telah dilakukan.
- *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*
Pada Triwulan I didapatkan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sebagai berikut.

Tabel 3.1.9-2. PNBP Triwulan I

Bulan	PNBP	Total Triwulan
Januari	Rp 182.440.416	Rp 590.069.911
Februari	Rp 217.194.895	
Maret	Rp 190.434.600	

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 110.550.007 atau 8,50% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.300.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

Tabel 3.1.9-3. Realisasi IKU 11 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.REB.002.051] Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES	Rp 200.000.000	Rp 0 (0,00%)	-
2.	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	Rp 1.100.000.000	Rp 110.550.077 (10,05%)	-
TOTAL		Rp 1.300.000.000	Rp 110.550.077 (8,50%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan April – Juni 2024.

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ekstraksi termasuk yang berasal dari laut dalam dengan skala lebih besar dari 50 liter/detik dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah tindakan inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS. Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 PNBP BPSPL Pontianak

SK-10	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	5	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan pada Triwulan I yaitu sosialisasi perizinan bidang jasa kelautan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 5 lokasi kawasan yang terfasilitasi perizinan pengelolaan perairan. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka Menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Sosialisasi perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan, telah dilaksanakan. Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh keaktifan pemohon dalam mengajukan pemanfaatan perizinan air laut selain energi. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Kelautan dan melakukan sosialisasi perizinan berusaha bidang jasa kelautan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Sosialisasi Perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan

Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 di Hotel Novotel Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri oleh ... orang yang berasal dari instansi pemerintah. Saat ini, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sedang direvisi, termasuk perizinan berusaha di bidang jasa kelautan dan sektor kelautan dan perikanan lainnya. Contoh perizinan berusaha di bidang jasa kelautan antara lain izin pemanfaatan pasir laut, izin pelaksanaan reklamasi, izin pemanfaatan air laut dan izin-izin lainnya. Pemanfaatan ALSE dibagi menjadi dua KBLI: 36001 (penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum) dan 36001 (penampungan dan penyaluran air baku). Dokumen dan persyaratan khusus merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3.1.10-1. Sosialisasi Perizinan Berusaha Jasa Kelautan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2363.PBW.002] Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 22.572.987 atau 22,57% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.

Tabel 3.1.10-2. Capaian IKU 12 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2363.PBW.002.052] Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	Rp 100.000.000	Rp 22.572.987 (22,57%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp 22.572.987 (22,57%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu verifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) apabila ada pengajuan permohonan perizinan Pemanfaatan ALSE.

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merujuk pada satuan wilayah Kabupaten/Kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau Kecil berupa kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

SK-11	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			4	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya: identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gernas BCL, identifikasi dan verifikasi nelayan dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pihak terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak” merupakan IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu sebanyak 5 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gernas BCL

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di tiga lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Desa Tanipah Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 – 20 Januari 2024 . Di Desa Tanipah, sudah ada mesin pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2018. Namun mesin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang dicuri. Terdapat kelompok nelayan aktif yang sebagian besar anggotanya sudah memiliki KUSUKA di kedua lokasi tersebut. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut didominasi oleh sampah kayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di sekitar Desa Tanipah, namun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang berjarak 22 km. Terdapat bank sampah di Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi keaktifannya.



Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan di Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam dan Desa Keraya, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 16 – 18 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Teluk Bogam yang sudah memiliki mobil pengangkut sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampah di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Keraya belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.



Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah

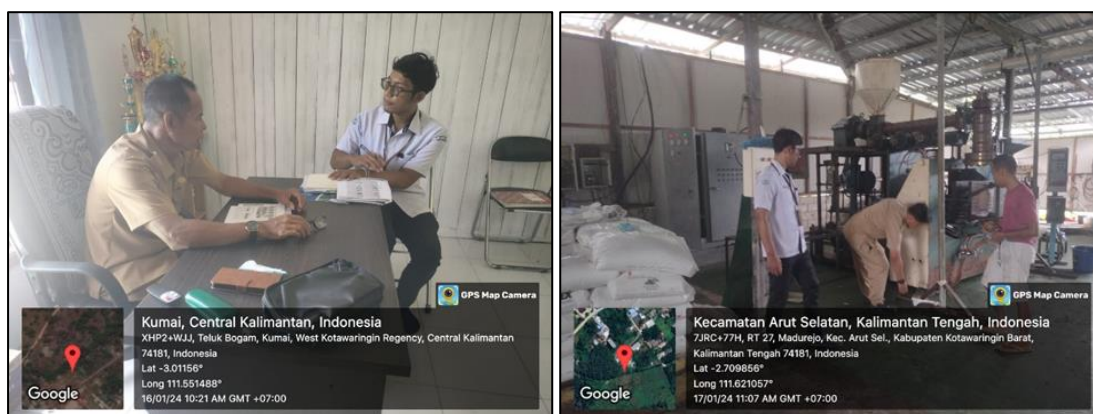
Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Setapak Besar, Desa Kuala dan Desa Naram Kota Singkawang pada tanggal 16 – 19 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan mitra pengelola sejauh 3 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 15 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggian Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah laut dan pembersihan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang mereka kumpulkan hanya ditimbun atau dibuang ke TPS terdekat dan belum ada kerjasama dengan mitra bank sampah untuk penjualan sampah yang terkumpul atau model economy sirkular lainnya dari sampah dikumpulkan.

b. **Identifikasi dan Verifikasi Nelayan dan Mitra**

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan nelayan setempat. Terdapat 80 nelayan dan KUB yang sudah diidentifikasi. Identifikasi terhadap mitra yang berkomitmen untuk mendukung kegiatan BCL berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Beberapa bank sampah/ pengumpul sampah juga berhasil diidentifikasi sebagai mitra *offtaker* potensial. Indikator penilaian lainnya, seperti harga ikan terendah dan musim melaut serta musim paceklik juga sudah dilakukan. Harapannya data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensi lokasi ini bisa mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan Gernas BCL.



Gambar 3.1.11-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok nelayan setempat. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan data kelompok nelayan di Daerah Aluh-Aluh Kab. Banjar dan Sungai Bakau Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut, belum terverifikasi keaktifannya.



Gambar 3.1.11-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya diperoleh informasi tentang Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data bahwa di Kota Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kota Singkawang dengan hasil berupa data kelompok nelayan di Setapak Besar dan Kuala sebanyak 9 (sembilan) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan meliputi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan DP3 Kota Balikpapan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gernas BCL Tahun 2024 dan mengusulkan agar kegiatan Gernas ini dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kampanye dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih melalui Gernas BCL.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD.001] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 75.460.534 atau 4,37% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Tabel 3.1.11-2. Realisasi Anggaran IKU 13 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 34.970.034 (4,37%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp75.460.534 (4,37%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Kegiatan sosialisasi dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Gernas BCL dengan melibatkan nelayan lokal, instansi daerah dan *stakeholder* lain yang terkait.

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Delapan indikator tersebut diantaranya:

- Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
- Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
- Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
- Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
- Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
- Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
- Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
- Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
- Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
93,03	Periode Capaian Semesteran			93,76	-	90	-	90	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu nilai IKPA sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKM dilakukan secara semesteran.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu 90 di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan I dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKM ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung/periode pengukuran semesteran.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketertiban dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, tim pengelola keuangan melakukan monitoring secara berkala. Dengan begitu, permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Revisi DIPA
- b. Penyerapan Anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp 3.620.583.906 atau 19,47% dari pagu anggaran sebesar Rp 18.598.113.000.
- c. Data Kontrak sebanyak 8 kontrak pada bulan Januari - Maret 2024
- d. Penyelesaian Tagihan setiap bulan
- e. Penyelesaian UP sebanyak 2 kali
- f. Pengisian Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari-Maret 2024
- g. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka pelaksanaan anggaran.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2367.EBA] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 2.654.736.659 atau 28,75% dari pagu anggaran sebesar Rp 9.231.134.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan Lingkup BPSPL Pontianak, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel 3.1.12-2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.956.051] Layanan BMN	Rp 43.800.000	Rp 170.034 (0,39%)	-
2.	[2367.EBA.958.051] Layanan Kehumasan	Rp 52.000.000	Rp 7.435.289 (14,30%)	-
3.	[2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp 6.297.000.000	Rp 1.532.840.732 (24,34%)	-
4.	[2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 2.704.534.000	Rp 1.070.702.871 (39,59%)	-
5.	[2367.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan	Rp 133.800.000	Rp 43.587.767 (32,58%)	-
TOTAL		Rp 9.231.134.000	Rp 2.654.736.659 (28,75%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

- Revisi Halaman III DIPA (Kewenangan KPA)
- Pelaksanaan kontrak pengadaan
- Penyelesaian tagihan dan penyerapan anggaran
- Pengisian CRO bulan April – Juni 2024

IKM 15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- Baik, apabila NKA >80 – 90;
- Cukup, apabila NKA >60 – 80 ;

- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak Sebagai berikut

Tabel 3.1.12-3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak									
IKM-15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
85,85	Periode Capain Tahunan			86	-	89	-	89	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu nilai NKA sebesar 89 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKM dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu 90 di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan I dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKM ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung/periode pengukuran tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS

dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari – Februari 2024 pada aplikasi SAKTI yang kemudian divalidasi pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan input Capaian Rincian Output (CRO) bulan April – Juni 2024 pada aplikasi SAKTI. Menyusun Laporan Semester I tahun 2024 pada aplikasi SMART DJA.

IKM 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar penilaian antara lain:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.
- c. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
- d. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi senilai 90,81. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2022.

Tabel 3.1.12-4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
90,81	Periode Capaian Tahunan			75	-	90	-	90	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM ini tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 10 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRKL Triwulan I Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 80. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRKL Triwulan I Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat kontrol internal dilakukan secara *hybrid* menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk periode Januari – Maret 2024.
- b. Audit internal penerapan sistem manajemen mutu pada tanggal 13 Februari 2024 secara *hybrid* di Kantor BPSPL Pontianak dan *zoom meeting*.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2367.EBA] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 3.725.800 atau 6,22% dari pagu anggaran sebesar Rp 59.880.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan Penunjang WBK dan Konsumsi Rapat.

Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.960.053] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp 59.880.000	Rp 3.725.800 (6,22%)	-
TOTAL		Rp 59.880.000	Rp 3.725.800 (6,22%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan II yaitu pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk bulan April – Juni dan sosialisasi/internalisasi pembangunan Zona Integritas di BPSPL Pontianak.

IKM 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25%
- b. Kompetensi memiliki bobot 40%
- c. Kinerja memiliki bobot 30%
- d. Disiplin memiliki bobot 5%

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan

hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/Tinggi
71 - 80	Rentan Tidak Profesional/Sedang
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah

Hasil pengukuran berdasarkan Indikator tersebut diambil langsung dari *dashboard* IP ASN KKP yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di laman <http://ropeg.kkp.go.id>.

Tabel 3.1.12-6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
90,84	Periode Capaian Semesteran			88	-	76	-	76	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PKRL sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode pencapaian dilakukan secara semesteran.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode pencapaian dilakukan secara semesteran.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi diri tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- Pelatihan, Diklat, Bimtek, *workshop* dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai bulan Januari – Maret 2024.
- Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai bulan Januari – Maret dan Monitoring Triwulan I 2024.
- Penilaian prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN bulan Januari – Maret tahun 2024.
- Rekapitulasi prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN bulan Januari – Maret tahun 2024.
- Rekapitulasi dan monitoring presensi pegawai bulan Januari – Maret tahun 2024.
- Mengikuti pelatihan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Tim Kerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut, Direktorat PRL tanggal 21 Februari 2024.
- Mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Ruang Laut yang diselenggarakan oleh Direktorat PRL.
- Mengikuti Bimbingan Teknis IGT Biota Laut Dilindungi yang diselenggarakan oleh Direktorat KEBP pada tanggal 6 – 7 Februari 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD] Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 18.904.000 atau 6,21% dari pagu anggaran sebesar Rp 304.453.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan.

Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKM 17

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	Rp 304.453.000	Rp 18.904.000 (6,21%)	-
TOTAL		Rp 304.453.000	Rp 18.904.000 (6,21%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu rekapitulasi dan monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai, rekapitulasi dan monitoring Sasaran Kinerja

Pegawai, rekapitulasi dan monitoring Presensi Pegawai serta mengikuti pelatihan, bimtek, seminar ataupun *workshop* yang diselenggarakan baik dari BPSPL Pontianak maupun oleh pihak luar.

IKM 18. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.12-8. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak

		mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKM 18 Sebagai berikut

Tabel 3.1.12-9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-18	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
88,2	Target Capaian Tahunan			81	-	-	-	83,75	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PKRL sebesar 83,75. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Pontianak sebesar 92. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Hal itu didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan sub tim perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal

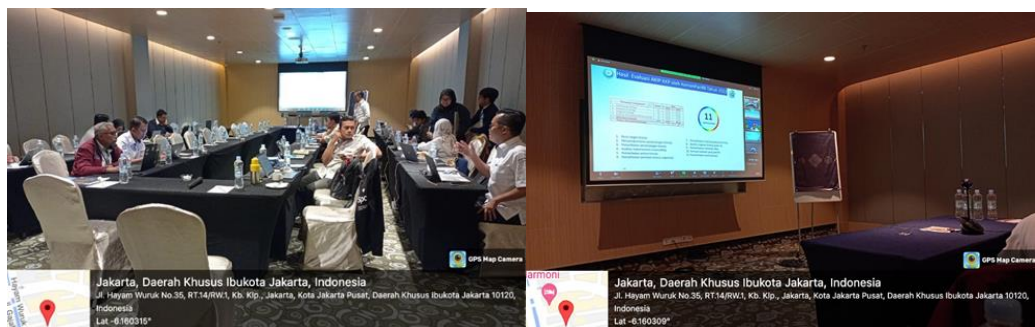
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

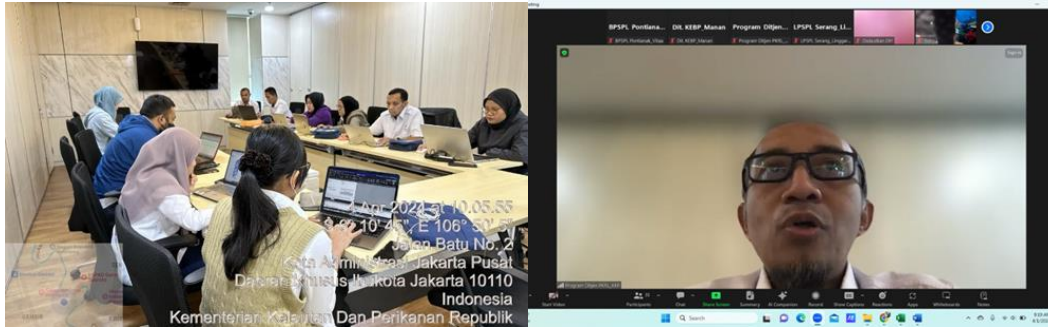
Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan *dropbox*, *google drive* dan aplikasi penyimpanan lainnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PKRL tahun 2024 pada tanggal 29 Januari s.d. 1 Februari di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Penyusunan Manual IKU Level 2 Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring.
- c. Sosialisasi, *Approval* dan Verifikasi Pelaporan melalui Aplikasi Kinerjaku dan e-Money Bappenas lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 1 – 5 April 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- d. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2024.





Gambar 3.1.12-1. Kegiatan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 29.839.069 atau 14,44% dari pagu anggaran sebesar Rp 206.500.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel xx. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan I

Tabel 3.1.12-10. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 97.000.000	Rp 17.727.984 (18,28%)	-
2.	2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 109.500.000	Rp 12.111.085 (11,06%)	-
TOTAL		Rp 206,500,000	Rp 29,839,069 (14,44%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu menyusun laporan kinerja Triwulan II tahun 2024, pembahasan pengukuran kinerja lingkup Ditjen PKRL Triwulan II tahun 2024, verifikasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024.

IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024. Teknik perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.12-11. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-19	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
4	1	1	100	4	25	-	-	4	25

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 telah tercapai 1 (satu) dokumen (100%) dari target 1 (satu) dokumen. Capaian IKM 19 berupa Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.90/BPSPL.2/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Triwulan I Tahun 2023 adalah sama meliputi 1 (satu) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar 3. Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 telah berkontribusi dalam pemenuhan dokumen SPIP pada target Renstra DJPRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan I dengan jumlah 1 (satu) dokumen telah berkontribusi 25% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target Triwulan I. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKRL tepat waktu setiap triwulan (minggu pertama setelah triwulan berakhir), maksimal tanggal 10.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring.

Tabel 3.1.12-12. Efisiensi dari capaian IKM 19 Triwulan I

Indikator Kinerja Kegiatan	NPSS (%)	Alokasi Anggaran			Efisiensi (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	100	24.500.000	0	0	100

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Monitoring dan Evaluasi Form Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko (MR) Triwulan IV Tahun 2023 secara daring pada 15 Januari 2024.
- b. Penyampaian usulan data personil Tim SPIP dari BPSPL Pontianak melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.237/BPSPL.2/TU.110/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan Data Personil Tim SPIP DJPKRL.
- c. Pembahasan Rancangan Surat Keputusan Satgas SPIP dan Tim SPIP Ditjen PKRL Tahun 2024 pada tanggal 13 Februari 2024 secara daring.
- d. Workshop SPIP dan Manajemen Risiko DJPKRL pada tanggal 15-16 Februari 2024 secara daring.
- e. Pembahasan Laporan SPIP Bulan Februari pada tanggal 8 Maret 2024 secara daring.
- f. *Focus Group Discussion* (FGD) dan Monitoring Pelaporan Manajemen Risiko (MR) Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 25 Maret 2024 secara daring.
- g. Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember atau Triwulan IV telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.90/BPSPL.2/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023.
- h. Penyelenggaraan SPIP Bulan Januari telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.378/BPSPL.2/TU.140/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember Tahun 2024.
- i. Penyelenggaraan SPIP Bulan Februari telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.696/BPSPL.2/TU.140/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Februari Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan Rincian Output [EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM 19 Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp24.500.000 atau 0% dari pagu anggaran Rp24.500.000.

Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBD.953.051.D] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR)	Rp24.500.000	Rp0 (0%)	-
TOTAL		Rp24.500.000	Rp0 (0%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi Triwulan II adalah:

- a. Penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024, serta melakukan publikasi Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024.
- b. Menyusun Laporan SPIP Bulan April, Mei, Juni dan Triwulan II Tahun 2024

IKM 20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu

Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office* KKP pada laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin *upload* keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud adalah:

- a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5.
- b. Konten berupa infografis dengan poin 1.
- c. Konten video/*campaign* diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:

- Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin *upload* keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level II dihitung dari keaktifan Eselon II
- Sesditjen PRL menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKM MP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 3.1.12-14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-20	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
116,65	94	116,67	124,11	94	120	90	120	90	120

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024 IKM tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 100% dengan persentase capaian 116,65% dari target nilai 92. Sehingga target pada Renstra BPSPL Pontianak maupun Renstra DJPRL telah tercapai melebihi yang ditargetkan. Lebih lanjut pada tahun 2023 target meningkat sebanyak 2 poin dari tahun 2023 yaitu dari 92 menjadi 94. Pada Triwulan I 2024 target MP 94 dan telah tercapai 100% dari target triwulanan dengan persentase capaian 124,11%. Capaian MP pada Triwulan I 2024 sebanding dengan capaian MP Triwulan I 2023 yaitu 100%. Capaian IKM 20 disampaikan oleh melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2075/DJPKRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Penyampaian Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 yaitu 100% (108,70% dari target triwulanan), sedangkan capaian Triwulan I tahun 2022 yaitu 100% (116,28% dari target triwulanan). Artinya terdapat kenaikan capaian MP pada Triwulan I 2024 sebesar 7,58%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar sebesar 90%. Capaian BPSPL Pontianak pada Triwulan I tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar sebesar 90%. Capaian pada Triwulan I tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian sebesar 124,11% dari target renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan I sebesar 116,67% atau 124,11% dari target tahunan. Hal itu didukung oleh pemanfaatan aplikasi Portal KKP yang digunakan oleh pegawai lingkup BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena pekegiatan pendukung dilakukan secara daring.

Tabel 3.1.12-15. Efisiensi dari capaian IKM 20 Triwulan I

Indikator Kinerja Kegiatan	NPSS (%)	Alokasi Anggaran			Efisiensi (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	124,11	-	-	-	124,11

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- Keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Sub-bagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal *Collaboration Office* KKP.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan II yaitu Keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Sub-bagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal *Collaboration Office* KKP pada bulan April – Juni.

IKM 21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian IKU ini dinilai dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen PRL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama dengan target. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada kinerja sebesar 120%.

Tabel 3.1.12-16. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	100	100	100	100	-	80	-	80	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024, telah dilakukan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 9 Maret 2024. Dari hasil audit tersebut didapatkan jumlah rekomendasi sebanyak 9 dimana 9 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan upload dokumen pada SIDAK (100% ditindaklanjuti) sehingga persentase progres capaian sudah sebesar 100% dari target capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 sebesar 100% ditindaklanjuti sama dengan Capaian Triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 100% ditindaklanjuti.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PKRL sebesar 90%. Capaian sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti dan disampaikan sebesar 80%. Capaian Triwulan I tahun 2024 sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra BPSPL Pontianak sebesar 125%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi atas Audit Kinerja TA. 2023-2024 dengan Nomor T.133/ITJ.3/HP.110/III/2024 pada tanggal 9 Maret 2024 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 9 dimana 9 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan upload dokumen pada SIDAK.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IKM 22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 3.1.12-17. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-21	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Periode Capaian Tahunan			100	-	100	-	≤1	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan I belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan I.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKM belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan I.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di triwulan II.

IKM 23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

- a. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
- b. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah disepakati pada pleno hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup DJPKRL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut.

Tabel 3.1.12-18. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKM 23 Sebagai berikut

Tabel 3.1.12-19. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-23	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Target Capaian Tahunan			80	-	72,5	-		

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan inventarisasi bantuan KOMPAK yang telah diberikan dan melakukan koordinasi terkait dengan Monitoring dan Evaluasi KOMPAK.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKM tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 72,5% pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena belum dapat dilakukan pada Triwulan I.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Melakukan inventarisasi Kelompok Masyarakat yang telah menerima Bantuan KOMPAK dari BPSPL Pontianak
- b. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK yang telah diberikan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 8.862.437 atau 18,28% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.455.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.12-20. Realisasi Anggaran IKM 23 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.QEH.001.052] Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Rp 47.455.000	Rp 8.862.437 (18,28%)	-
TOTAL		Rp 47.455.000	Rp 8.862.437 (18,28%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencanan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu memeriksa kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan serta melakukan koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK.

IKM 24. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: Pengawasan sistem kearsipan internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif dan Pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.1.12-21. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60

C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 3.1.12-22. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak

SK-12	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-24	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0	Target Capaian Tahunan			65	-		-		-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKM belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dalam penyampaian Revisi DIPA dapat dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini belum dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM tersebut.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 8.862.437 atau 18,28% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.455.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Tabel 3.1.12-23. Realisasi Anggaran IKM 24 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp 38.250.000	Rp 1.900.000 (6,22%)	-
TOTAL		Rp 47.455.000	Rp 1.900.000 (6,22%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di triwulan II.

3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen PKRL dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagian besar Indikator Kinerja diukur secara tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Pada IKU Bantuan Kelompok Masyarakat yang diserahkan, semua unit kerja belum memiliki capaian dikarenakan penyerahan bantuan dijadwalkan akan dilakukan pada Triwulan II. Pada IKU pelaporan SPIP, semua unit kerja telah menyampaikan Laporan SPIP kepada Ditjen PKRL. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar oleh BPSPL Pontianak menjadi yang terendah diantara unit kerja lain dengan nilai sebesar 116,67% sementara unit kerja lain mendapatkan nilai 133, 33%. Pada IKU Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti, semua unit kerja telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 3.1.12-1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain

No	IKU	BPSPL Pontianak	BPSPL Padang	BPSPL Makassar	BPSPL Denpasar	LPSPL Serang	LPSPL Sorong
1	Nilai PNBP BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
4	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Daerah Yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
6	Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
7	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
8	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	-	-	-	-	-	-
9	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
10	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	2

No	IKU	BPSPL Pontianak	BPSPL Padang	BPSPL Makassar	BPSPL Denpasar	LPSPL Serang	LPSPL Sorong
11	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Semesteran	Periode Pengukuran Semesteran	Periode Pengukuran Semesteran	Periode Pengukuran Semesteran	Periode Pengukuran Semesteran	Periode Pengukuran Semesteran
15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
18	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
19	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak	1	1	1	1	1	1
20	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	116.67	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	100	100	100	100	100	100
22	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
23	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan
24	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan	Periode Pengukuran Tahunan

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2024 Nomor: SP DIPA 032.07.2.477425/2024 dengan pagu anggaran sebesar **Rp 18.598.113.000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/>. Pada Triwulan I tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar **Rp 3.620.583.906** atau **19,47%** dari pagu anggaran. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp 350.000.000 sehingga realisasi anggaran dari pagu netto sebesar **19,84%**. Adapun pagu dan realisasi per-kegiatan sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23.1.12-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan I

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
1.	(2362) Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	RM dan PNP	5,876,306,000	558,440,944	9,50	350.000.000
2.	(2363) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	100,000,000	22,572,987	22,57	-
3.	(2366) Perencanaan Ruang Laut	RM dan PNP	1,150,000,000	126,122,845	10,97	-
4.	(2367) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	10,671,807,000	2,878,477,096	29,97	-
5.	(4346) Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RM	800,000,000	34,970,034	4,37	-
Total			18,598,113,000	3,620,583,906	19,47	

Sumber data: Aplikasi OMSPAN BPSPL Pontianak per 31 Maret 2023

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk :
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
5. Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.122-3.1.12-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Periode	Pagu (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	(51) Pegawai	Triwulan I	6.297.000.000	1.532.839.354	24,34
5.	(52) Barang	Triwulan I	11.508.113.000 (350.000.000*)	2.027.336.230	17,62
9.	(53) Modal	Triwulan I	793.000.000	60.408.322	7,62

(*) *Blokir Anggaran*

Sumber Data : BPSPL Pontianak (Aplikasi Omspan per tanggal 31 Maret 2024)

Dari total pagu anggaran berdasarkan revisi terakhir (Bulan Februari/Triwulan I) alokasi untuk belanja pegawai sebesar 3386%, untuk belanja barang sebesar 61,88% dan untuk belanja modal 4,26%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan I sebesar Rp 1.532.839.354 (24,34%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan I sebesar Rp 2.027.336.230 atau 17,62% dari pagu anggaran Rp 11.508.113.000 (18,17% netto). Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut
 - a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kantor/pos pelayanan, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
 - b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal Triwulan I sebesar Rp 60.408.322 (7,62%). Belanja modal digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sarpras Pendukung Konservasi berupa Drone DJI sebanyak 1 unit dan Penggantian Uang Persediaan PNBK untuk Keperluan Belanja Modal.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan I tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Hasilnya terlihat bahwa sebagian besar dari target-target sasaran yang ingin dicapai pada Triwulan I telah tercapai. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan I Tahun 2024 jika dilihat dari nilai **NPSS IKU+IKM** dari aplikasi *kinerjaku* sebesar **115%** dengan kategori **Istimewa**. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan I 2024 sebesar **Rp 3.620.583.906** atau **19,47%** dari pagu anggaran sebesar Rp 18.598.113.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp 350.000.000 sehingga realisasi anggaran dari pagu netto sebesar 19,84%. Untuk capaian indikator kinerja yang telah tercapai di Triwulan I ini sebagai berikut:

1. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian **100%**.
2. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian **116,67%**.
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dengan capaian **100%**.

Target IKU dan IKM yang memiliki target pada Triwulan I tercapai secara keseluruhan dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target pada Triwulan I masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 18 Indikator Kinerja Kegiatan memiliki periode capaian yang diukur tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengusahakan untuk proses revisi anggaran dalam rangka buka anggaran yang telah diblokir.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN sampai dengan pencantuman gelar pendidikan, bagi ASN yang telah melakukan Tugas/ljin Belajar.
3. Mempertahankan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah dengan melakukan pendampingan secara mandiri pada kelompok penerima bantuan dalam rangka pelaporan pemanfaatan bantuan yang telah diterima.

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti yaitu telah dilakukan koordinasi secara aktif dan berkelanjutan terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut. Selain itu juga perlu ditingkatkan soliditas diantara seluruh unsur di BPSPL Pontianak, koordinasi dan komunikasi baik dengan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut atau dengan Stakeholder di daerah agar selalu dijaga bahkan ditingkatkan terus sehingga kinerja BPSPL Pontianak akan lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

LAMPIRAN

1. Surat Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 nomor B.1123/BPSPL.2/TU/140/IV/2024 tanggal 19 April 2024
2. Surat Penyampaian Capaian Presentase Satuan kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024.
3. Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jeneral nomor 2990.31.03/ITJ/PL.420/III/2024.

Contents

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	70
3. 2. Realisasi Anggaran.....	97
BAB IV PENUTUP	99
4.1. Kesimpulan.....	99
4.2. Rekomendasi.....	99
4.3. Tindak Lanjut.....	99
LAMPIRAN	100

Gambar 3.1.12-1. Kegiatan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja82

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak	70
Tabel 3.1.12-2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan I	72
Tabel 3.1.12-3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak	73
Tabel 3.1.12-4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak.....	75
Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan I	76
Tabel 3.1.12-6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak.....	77
Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKM 17	78
Tabel 3.1.12-8. Kategori Nilai PM SAKIP	79
Tabel 3.1.12-9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak.....	80
Tabel 3.1.12-10. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan I	82
Tabel 3.1.12-11. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak	83
Tabel 3.1.12-12. Efisiensi dari capaian IKM 19 Triwulan I.....	83
Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan I	84
Tabel 3.1.12-14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak	85
Tabel 3.1.12-15. Efisiensi dari capaian IKM 20 Triwulan I.....	86
Tabel 3.1.12-16. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak	87
Tabel 3.1.12-17. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak	88
Tabel 3.1.12-18. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah.....	90
Tabel 3.1.12-19. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak	91
Tabel 3.1.12-20. Realisasi Anggaran IKM 23 Triwulan I.....	92
Tabel 3.1.12-21. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan	92
Tabel 3.1.12-22. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak	93
Tabel 3.1.12-23. Realisasi Anggaran IKM 24 Triwulan I.....	94
Tabel 3.2-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan I	97
Tabel 3.2-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023	98

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan I tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Hasilnya terlihat bahwa sebagian besar dari target-target sasaran yang ingin dicapai pada Triwulan I telah tercapai. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan I Tahun 2024 jika dilihat dari nilai **NPSS IKU+IKM** dari aplikasi *kinerjaku* sebesar **115%** dengan kategori **Istimewa**. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan I 2024 sebesar **Rp 3.620.583.906** atau **19,47%** dari pagu anggaran sebesar Rp 18.598.113.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp 350.000.000 sehingga realisasi anggaran dari pagu netto sebesar 19,84%. Untuk capaian indikator kinerja yang telah tercapai di Triwulan I ini sebagai berikut:

1. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian **100%**.
2. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian **116,67%**.
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dengan capaian **100%**.

Target IKU dan IKM yang memiliki target pada Triwulan I tercapai secara keseluruhan dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target pada Triwulan I masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 18 Indikator Kinerja Kegiatan memiliki periode capaian yang diukur tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengusahakan untuk proses revisi anggaran dalam rangka buka anggaran yang telah diblokir.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN sampai dengan pencantuman gelar pendidikan, bagi ASN yang telah melakukan Tugas/Ijin Belajar.
3. Mempertahankan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah dengan melakukan pendampingan secara mandiri pada kelompok penerima bantuan dalam rangka pelaporan pemanfaatan bantuan yang telah diterima.

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti yaitu telah dilakukan koordinasi secara aktif dan berkelanjutan terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut. Selain itu juga perlu ditingkatkan soliditas diantara seluruh unsur di BPSPL Pontianak, koordinasi dan komunikasi baik dengan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut atau dengan Stakeholder di daerah agar selalu dijaga bahkan ditingkatkan terus sehingga kinerja BPSPL Pontianak akan lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

LAMPIRAN

1. Surat Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 nomor B.1123/BPSPL.2/TU/140/IV/2024 tanggal 19 April 2024
2. Surat Penyampaian Capaian Presentase Satuan kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024.
3. Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jeneral nomor 2990.31.03/ITJ/PL.420/III/2024.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
PONTIANAK

JALAN HUSEIN HAMZAH, KEL. PAL LIMA, KEC. PONTIANAK BARAT, PONTIANAK 78114
TELEPON (0561) 766691, FAKSIMILE (0561) 766465
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.1123/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 19 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP
Triwulan I Tahun 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
di Kota Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Nomor B.2074/DJPKRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024 hal Pelaporan
Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2024 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak pada tautan <http://tiny.cc/8h2txz>.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Sesditjen kami ucapkan terima
kasih.

Kepala Balai Pengelolaan
Sumber Daya Pesisir dan Laut
Pontianak,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.2075/DJPKRL.1/TU.140/IV/2024 4 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Menyampaikan Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Berkenaan dengan pengukuran capaian kinerja Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghitungan poin berdasarkan *posting* berbagi pengetahuan melalui laman <https://portal.kkp.go.id/> dengan target 3 poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan.
2. Poin berasal dari pilihan kategori dan pembobotan, yaitu:
 - a. Dokumentasi kegiatan **rapat/seminar/workshop/diseminasi** yang diunggah dan dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai **bobot poin 0,5**. Dalam hal unggah kegiatan **Apel Pagi** tidak mendapatkan nilai;
 - b. Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 1**; dan/atau
 - c. Berbagi informasi berupa video atau *campaign* dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 3**.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan penghitungan sesuai rumus:

$$\text{Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah poin pejabat yang aktif}}{\text{Jumlah target poin pejabat yang aktif}} \times 100\%$$

3. Hasil pengukuran capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Triwulan I disajikan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Ditjen PRL



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran 1 Surat

Nomor : B.2075/DJPKRL.1/TU.140/IV/2024

Tanggal : 4 April 2024

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
2. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
5. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
6. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
7. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
8. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

a.n. Direktur Jenderal PKRL

Sekretaris Ditjen PRL



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

A. Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024

No	Satker	Target PK	Capaian (%)				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
1.	BPSPL Padang	94	133,33	-	-	-	133,33
2.	LKKPN Pekanbaru	94	133,33	-	-	-	133,33
3.	LPSPL Serang	94	133,33	-	-	-	133,33
4.	BPSPL Pontianak	94	116,67	-	-	-	116,67
5.	BPSPL Makassar	94	133,33	-	-	-	133,33
6.	BPSPL Denpasar	94	133,33	-	-	-	133,33
7.	BKKPN Kupang	94	133,33	-	-	-	133,33
8.	LPSPL Sorong	94	133,33	-	-	-	133,33

B. Daftar Nilai Rinci per Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024

1. BPSPL Padang

BPSPL Padang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata – Rata Nilai MP TW I	133,33%

2. LKKPN Pekanbaru

LKKPN Pekanbaru	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata – Rata Nilai MP TW I	133,33%

3. LPSPL Serang

LPSPL Serang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata – Rata Nilai MP TW I	133,33%

4. BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak	Keaktifan
Target	3
Realisasi	3,5
Skor	116,67%
Nilai MP	116,67%
Rata – Rata Nilai MP TW I	116,67%

5. BPSPL Makassar

BPSPL Makassar	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata – Rata Nilai MP TW I	133,33%

6. BPSPL Denpasar

BPSPL Denpasar	Dokumen	Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,33%
Nilai MP		133,33%
Rata – Rata Nilai MP TW I		133,33%

7. BKKPN Kupang

BKKPN Kupang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata – Rata Nilai MP TW I	133,33%

8. LPSPL Sorong

LPSPL Sorong	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata – Rata Nilai MP TW I	133,33%

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Ditjen PRL



Kusdiantoro

Ditandatangani
Secara Elektronik



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAN www.kkp.go.id

BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL NOMOR - 2990.31.03/ITJ/PL.420/III/2024

Pada hari ini, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua empat**, telah dilakukan pembahasan dan penilaian atas data dukung penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan auditi: **BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK**

Dihadiri oleh:

Tim Auditi:

1. Nama: Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si
NIP: 197405132009011004
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Pontianak

Tim Pengawasan:

1. Nama: Ir. Noor Adram Bachtiar, M.M.
NIP: 196204241990021002
Jabatan : Pengendali Mutu/Supervisor
2. Nama: Tengku S.N.H., S.Pi, M.Si, QIA
NIP: 198110062005022001
Jabatan : Pengendali Teknis
3. Nama: Adi Nika Minamo, S.Pi., M.A.
NIP: 197804222005021001
Jabatan : Ketua Tim
4. Nama: Hendrawan Sapta B, S.AP, QIA
NIP: 197109221996031002
Jabatan : Anggota Tim
5. Nama: Akhmad Samudra P, SH, MH
NIP: 198105082005021002
Jabatan : Anggota Tim
6. Nama: Octa Agung N., SE, Ak., QIA
NIP: 198210082005021001
Jabatan : Anggota Tim
7. Nama: Ardhan Cipta Satria, ST
NIP: 199005282014031001
Jabatan : Anggota Tim
8. Nama: Eka Firdaus Prakosa, S.Pi
NIP: 199512172019021004
Jabatan : Anggota Tim
9. Nama: Dungdung S.S., S.Pi
NIP: 198109112005022002
Jabatan : Anggota Tim
10. Nama: PRITA ISVANDRIA PRADHIATI,
S.I.K
NIP: 199611222020122002
Jabatan : Anggota Tim
11. Nama: Anis Syahfitri Rilia Giamurti, S.Pi
NIP: 199403132019022004
Jabatan : Anggota Tim
12. Nama: Rifky Alfian
NIP: 199912272023021001
Jabatan : Anggota Tim

Dalam proses pemantauan/penilaian terhadap bukti pendukung tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP nomor: T.133 /ITJ.3/HP.110/III/2024, perihal Audit Kinerja TA 2023-2024 pada BPSPL Pontianak sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B.3105.1/ITJ.3/KP.440/III/2024, diperoleh hasil sebagaimana tertuang pada lampiran berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini bersifat penetapan sementara dan akan dilakukan validasi dan penetapan oleh Inspektur atas nama Inspektur Jenderal

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan pada tanggal:
31 Maret 2024

Pihak yang menyepakati,



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengendali Mutu/Supervisor

Ir. Noor Adram Bachtiar, M.M.
NIP. 196204241990021002

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

LAMPIRAN BATL

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Proses Permohonan Kuota Pemanfaatan Jenis Ikan oleh Pelaku Usaha Tidak Efektif	02.8.73	1.	Kepala BPSPL Pontianak agar memberikan teguran tertulis atas ketidacermatan Tim Evaluasi kuota pengambilan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES Tahap 1 Tahun 2023	0.00	27 Maret 2024 tekah terdapat surat teguran dari Kepala BPSPL Pontianak kepada Tim Evaluasi kuota pengambilan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES Tahap 1 Tahun 2023 nomor B.769/BPSPL.2/PRL.430/III/2024	0.00	TUNTAS
SOP Pelaporan Penerimaan Produk yang Dilengkapi SAJI DN Tidak Terdapat pada Aplikasi e-SAJI	03.11.87	2.	Kepala BPSPL Pontianak agar berkoordinasi secara tertulis kepada Direktur KKHL untuk mengakomodir seluruh tahapan SOP 1718 tentang Pelaporan Penerimaan Produk yang Dilengkapi SAJI pada aplikasi e-SAJI	0.00	27 Maret 2024 telah terdapat bukti koordinasi secara tertulis kepada Direktur KKHL untuk mengakomodir seluruh tahapan SOP 1718 tentang Pelaporan Penerimaan Produk yang Dilengkapi SAJI pada aplikasi e-SAJI melalui surat nomor No. B.768/BPSPL.2/PRL.430/III/2024 tanggal 15 Maret 2024	0.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kegiatan Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Puna TA 2023 Belum Optimal	02.8.73	3.	Kepala BPSPL Pontianak agar menginstruksikan Ketua Tim Kerja Pelestarian dan Perlindungan untuk a. Menyesuaikan SOP Pendataan Peny dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Apendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora	0.00	27 Maret 2024 telah terdapat tindak lanjut: <ul style="list-style-type: none"> surat instruksi dari Kepala BPSPL Pontianak kepada Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian nomor B.764/BPSPL.2/PRL.430/III/2024 tanggal 15 maret 2024; SOP Pendataan Peny yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Apendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora nomor B.865/BPSPL.2/PRL.430/III/2024 	0.00	TUNTAS
Kegiatan Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Puna TA 2023 Belum Optimal	02.8.73	4.	Kepala BPSPL Pontianak agar menginstruksikan Ketua Tim Kerja Pelestarian dan Perlindungan untuk melakukan koordinasi secara tertulis kepada DKP Provinsi Kalimantan Barat berkaitan kebutuhan data dasar yang dibutuhkan untuk pendataan peny oleh kelompok Wahana Bahari yaitu antara lain daya tetas telur, masa inkubasi telur, dan karakteristik habitat peneluran peny (yaitu informasi tentang vegetasi di sekitar habitat/pantai peneluran, jarak habitat peneluran ke pemukiman terdekat panjang pantai, penggunaan lahan di sekitar habitat/pantai peneluran, sudut kelandaian pantai dan pasang tertinggi).	0.00	27 Maret 2024 telah terdapat tindak lanjut: <ul style="list-style-type: none"> surat instruksi dari Kepala BPSPL Pontianak kepada Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian nomor B.764/BPSPL.2/PRL.430/III/2024 tanggal 15 maret 2024; Surat nomor B.766/BPSPL.2/PRL.430/III/2024 tanggal 15 maret 2024 tentang Penyampaian Informasi kebutuhan Data Dasar Monitoring / Pendataan Peny dari kepala BPSPL Pontianak kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat 	0.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanggungjawaban Belanja Modal Pengadaan Speedboat Tidak Sesuai Kontrak senilai Rp7.500.000,00	01.1.2	5.	Kepala BPSPL Pontianak agar menginstruksikan PPK untuk menarik kelebihan pembayaran senilai Rp7.500.000,00 kemudian disetor ke Rekening Kas Negara.	7,500,000.00	27 Maret 2024 telah terdapat bukti setor ke kas negara senilai Rp7.500.000,00 sesuai NTPN 56D342G4VPF90RSF	7,500,000.00	TUNTAS
Kelebihan Pertanggungjawaban Konsumsi Kegiatan/Rapat Senilai Rp1.384.600,00	01.1.4	6.	Kepala BPSPL Pontianak selaku KPA agar menginstruksikan secara tertulis kepada PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2024 agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya	0.00	27 Maret 2024 telah terdapat surat teguran kepada PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2024 agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai surat nomor <ul style="list-style-type: none">B.879/BPSPL.2/KP.820/III/2024 tanggal 21 maretB.878/BPSPL.2/KP.820/III/2024 tanggal 21 maretB.877/BPSPL.2/KP.820/III/2024 tanggal 21 maret	1,384,600.00	TUNTAS
Kelebihan Pertanggungjawaban Konsumsi Kegiatan/Rapat Senilai Rp1.384.600,00	01.1.4	7.	Kepala BPSPL Pontianak selaku KPA agar menginstruksikan secara tertulis kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp Rp1.384.600,00 untuk disetor ke rekening kas negara	1,384,600.00	27 Maret 2024 telah terdapat bukti setor ke kas negara senilai Rp1.384.600,00 sesuai dengan NTPN E8F980NA04AG6SDQ	1,384,600.00	TUNTAS
Kelebihan Pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp429.000,00	01.1.7	8.	Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala BPSPL Pontianak selaku KPA agar a. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK Tata Usaha, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2024 agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya	0.00	27 Maret 2024 Telah terdapat surat teguran kepada: <ul style="list-style-type: none">PPSPM nomor B.883/BPSPL.2/KP.820/III/2024 tanggal 21 maret 2024PPK nomor B.882/BPSPL.2/KP.820/III/2024 tanggal 21 Maret 2024Bendahara Pengeluaran nomor B.881/BPSPL.2/KP.820/III/2024 tanggal 21 Maret 2024	429,000.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kelebihan Pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp429.000,00	01.1.7	9.	Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala BPSPL Pontianak selaku KPA agar b. Menginstruksikan kepada pelaksana kegiatan yang namanya disebutkan pada kondisi diatas untuk membayarkan kelebihan pembayaran senilai total Rp429.000,00 untuk selanjutnya disetor ke Rekening Kas Negara	429,000.00	27 Maret 2024 telah terdapat bukti setor ke kas negara senilai Rp429.000,00 sesuai NTPN 5A2D97QLUOTJERKQ	429,000.00	TUNTAS
Kelebihan Pembayaran Penggandaan Laporan senilai Rp1,348,000,00	01.1.1	10.	Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala BPSPL Pontianak agar memberikan teguran tertulis kepada PPK dan PPSPM Satker VPSPL Pontianak tahun 2023 karena kurang cermat dalam pelaksanaan tugas	0.00	27 Maret 2024 Telah terdapat surat teguran kepada: • PPSPM nomor B.886/BPSPL.2/KP.820/III/2024 tanggal 21 maret 2024 • PPK nomor B.885/BPSPL.2/KP.820/III/2024 tanggal 21 Maret 2024	0.00	TUNTAS
Kelebihan Pembayaran Penggandaan Laporan senilai Rp1,348,000,00	01.1.1	11.	Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala BPSPL Pontianak agar b. Menginstruksikan secara tertulis PPK Satker BPSPL Pontianak Tahun 2023 untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.348.000,00 untuk disetor ke Rekening Kas Negara	1,348,000.00	27 Maret 2024 telah terdapat bukti setor ke kas negara senilai Rp1.348.000,00 sesuai NTPN B60AE0NA04AG6SLK	1,348,000.00	TUNTAS
Pembayaran listrik rumah negara tidak sesuai ketentuan	01.1.9	12.	Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala BPSPL Pontianak agar menginstruksikan secara tertulis kepada Penghuni Rumah Negara (lama) untuk setor ke kas negara atas penggunaan keuangan negara biaya langganan listrik yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.012.500,00	1,012,500.00	27 Maret 2024 telah terdapat bukti setor ke kas negara Rp 1.012.500,00 sesuai NTPN 115D70NA04AG6STC	1,012,500.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengelolaan BMN pada BPSPL Pontianak Belum tertib	02.8.73	13.	Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala BPSPL Pontianak selaku KPB agar berkoordinasi secara tertulis dengan Direktur P4K untuk melakukan transfer keluar BMN berupa Apple Ipad Mini 5 NUP 6 apabila BPSPL Pontianak tidak memerlukan BMN tersebut atau meminta agar BMN tersebut dikembalikan ke Satker BPSPL Pontianak	0.00	27 Maret 2024 telah terdapat surat nomor B.750/BPSPL.2/PL.710/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Kepala BPSPL Pontianak kepada Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan perihal Permintaan Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa Ipad Mini 5 NUP. 3100102999.6	0.00	TUNTAS



DIREKTORAT JENDERAL PKRL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kepala Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Pontianak

Syahrulwan Teruna Alkadrie, S.T., M.Si
NIP. 197406132009011004

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengendali Mutu/Supervisor

Ir. Noor Adram Bachtiar, M.M.
NIP. 196204241990021002



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMARAN www.kkp.go.id

FORM-10

Nomor : 2990.31.03/ITJ/PL.420/III/2024
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran : Lampiran 2. BATL LHP No. T.133 /ITJ.3/HP.110/III/2024
Hal : Penentuan Status Tindak Lanjut

31 Maret 2024

Yth. Kepala Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Pontianak
DIREKTORAT JENDERAL PKRL

Dengan ini disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menentukan status tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN		
		JUMLAH		NILAI KEUANGAN
		KEJADIAN	SARAN	
A	Temuan			
	1. Awal	9	13	11,674,100
B	Tindak Lanjut			11,674,100
	1. Tuntas	9	13	11,674,100
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
	3. RTDD	0	0	0
C	Sisa Temuan			0
	1. Tuntas	0	0	0
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
	4. RTDD	0	0	0

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur III

Ir.WAHJUDI POERWANTO,M.Ak
NIP. 19670116 199703 1 002